

PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK

JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

YUNIARTI MIFTAHUL JANNAH

4517021025

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuniarti Miftahul Jannah
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar

Saya menyatakan bahwa orang yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis,

Yuniarti Miftahul Jannah

4517021025

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL

KOTA MAKASSAR

YUNIARTI MIFTAHUL JANNAH

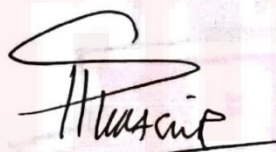
4517021025

Makassar, 24 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Natsir Tompo, M.Si.

NIDN.0915098603




Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.

NIDN.0906016701

Mengetahui,

Dekan FISIP

Universitas Bosowa Makassar



Arief D. Caksono, S.IP., M.A.

NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.

NIDN.0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

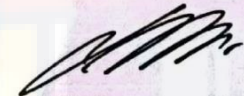
Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu, Dengan Judul Skripsi **PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR.**

Nama : Yuniarti Miftahul Jannah
No. Stambuk : 4517021025
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

Ketua



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.

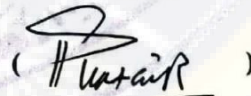
Sekretaris



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.

Tim Penguji Skripsi

1. Drs. Natsir Tompo, M.Si.



2. Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.



3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.



4. Dr. Drs. Syamsuddin Maldun, M.Pd.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat serta pengikutnya. Penulisan proposal berjudul ***“Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar”***, ini merupakan syarat bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan proposal pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, motivasi, pikiran, tenaga, dan doa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng** selaku rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. **Arief Wicaksono, SIP, MA** selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

3. **Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. **Drs. Natsir Tompo, M.Si** selaku pembimbing pertama dan **Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.** selaku pembimbing kedua yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Kepada dosen-dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNIBOS, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
6. Kepada **Dinas Sosial Kota Makassar** sebagai instansi terkait penelitian yang senantiasa menjadi point utama dalam penelitian ini.
7. **Kamil Kamaruddin, SE.**, selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan & Pengemis serta informan pertama dalam penelitian ini yang senantiasa membantu dan memberikan saran kepada penulis.
8. Kedua orang tua yakni **Bapak Surat Mojo SE.** dan **Ibu Hari Sukartiningsih SE.** serta saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan dan tak pernah bosan memotivasi penulis agar senantiasa tak pernah berhenti menuntut ilmu.
9. Kepada sahabat-sahabat **MANDIF : Fitriani, Nurul Imrani, Prihatini Destiningsih, Amanda Amalia dan Nur Anisah**, atas segala motivasi, doa, support system, canda dan tawa yang telah diberikan bagi penulis.

10. Kepada sahabat-sahabat **Titin Musa, Icariani, Inriani Chintya Dhiu dan Fika Febrianti**, atas segala bantuan selama penelitian dan kenangan yang begitu banyak dilewati bersama-sama di penghujung semester akhir. Terima kasih telah menjadi sahabat bagi penulis dahulu, sekarang dan selamanya.
11. Kepada teman-teman kelas **ADM A KECE 2017** yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama proses perkuliahan di kampus ini, semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada dan semoga harapan, cita-cita kita bersama dapat tercapai. Amin. See you on top.
12. Kepada seluruh teman-teman **Prodi Administrasi Negara Angkatan 2017 aka. PREMAN 03**, sampai bertemu dikesuksesan nanti.
13. Kepada **Bangtan Sonyeondan (BTS)** dan **One Direction** yang selalu ada di hati penulis dan selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada **Anak Jalanan** yang bersedia menjadi informan penelitian ini. Kedepannya peneliti berharap kelak anak jalanan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.
15. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive. I wanna*

*thank me for tryna do more right than wrong. Yuniarti Miftahul Jannah,
thankyu ☺*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berbesar hati dan ikhlas menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi para pembaca. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 Agustus 2021
Penulis

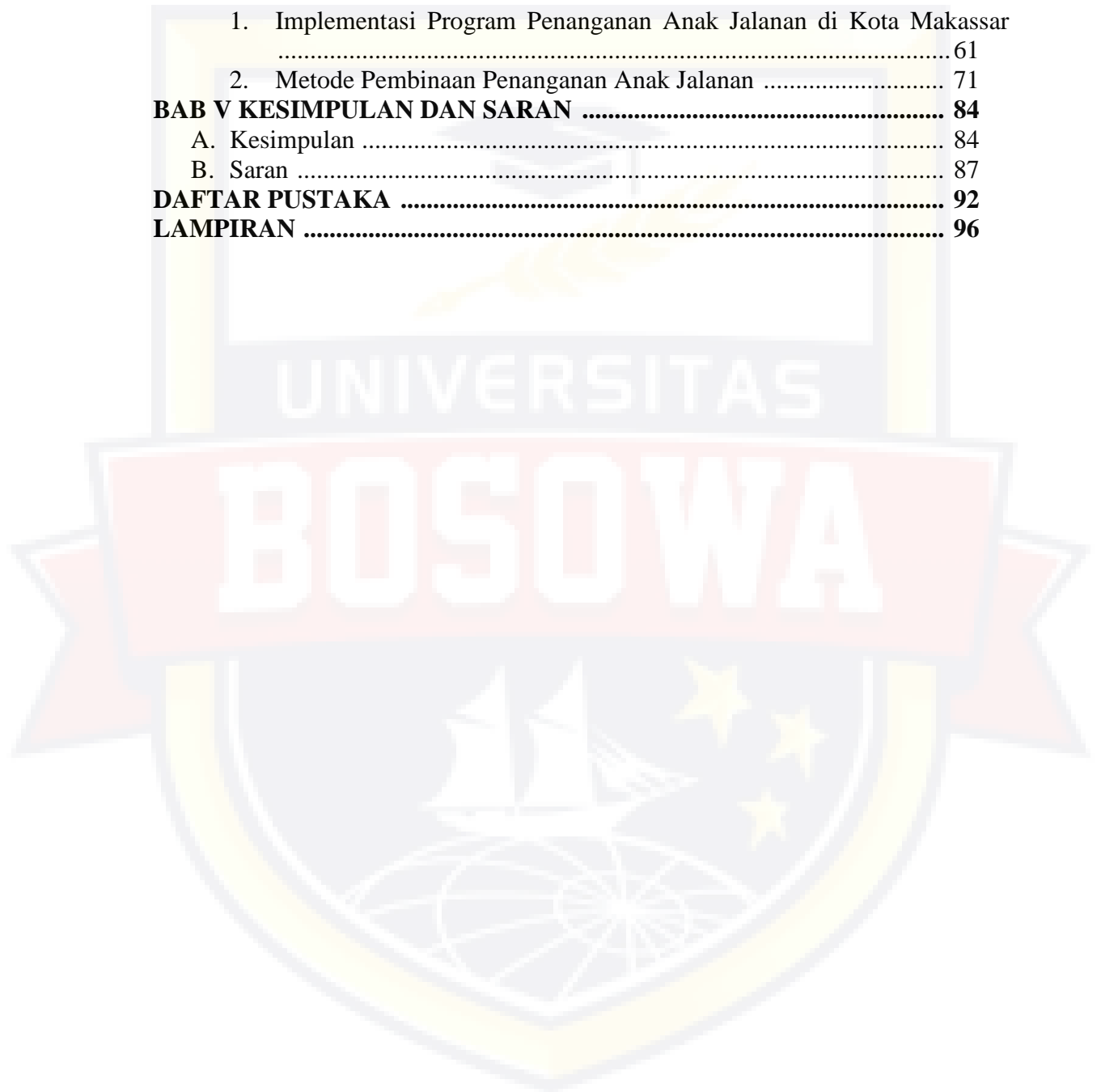


Yuniarti Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	9
1. Rumusan Masalah	9
2. Batasan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Implementasi	12
1. Pengertian Implementasi	12
2. Implementasi Kebijakan	13
3. Indikator Implementasi	14
B. Program Anak Jalanan	17
1. Pengertian Anak Jalanan	17
2. Kategori Anak Jalanan	19
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Anak Jalanan	22
4. Model Penanganan Anak Jalanan	23
5. Pembinaan	25
C. Penelitian Terdahulu	31
D. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian	38
B. Tipe dan Jenis Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian	42
E. Informan Penelitian	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data	46
I. Teknik Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar	53

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar	54
3. Struktur Organisasi	56
B. Identitas Informan	57
C. Hasil Penelitian	66
1. Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar	61
2. Metode Pembinaan Penanganan Anak Jalanan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual 37



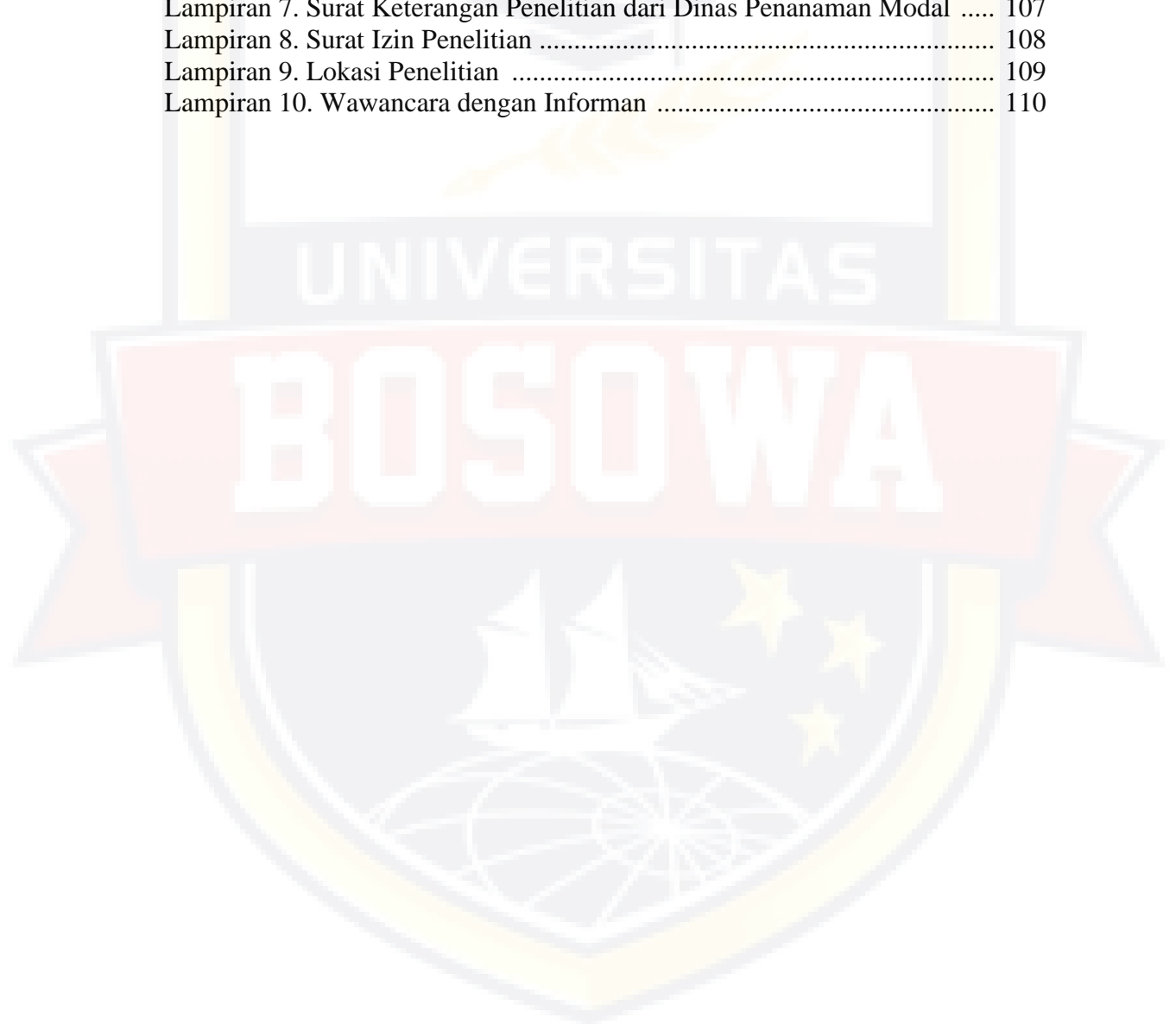
DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkembangan Jumlah Anak Jalanan di Kota Makassar pada Tahun 2018-2020	7
Tabel 2: Pendekatan dan Penanganan Anak Jalanan	25
Tabel 3: Penelitian Terdahulu	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	94
Lampiran 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar	96
Lampiran 3. Daftar Informan	97
Lampiran 4. Tabel Matriks untuk Pengembangan Instrumen Penelitian	98
Lampiran 5. Surat Permintaan Izin Penelitian dari Universitas	105
Lampiran 6. Surat Permintaan Izin Penelitian ke Dinas Penanaman Modal	106
Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal	107
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian	108
Lampiran 9. Lokasi Penelitian	109
Lampiran 10. Wawancara dengan Informan	110



ABSTRAK

Yuniarti Miftahul Jannah, Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. (dibimbing oleh Drs. Natsir Tompo, M.Si dan Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.)

Masalah anak jalanan menjadi sorotan publik dan perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang keberadaannya seringkali dirasakan sangat tidak menyenangkan dan meresahkan banyak orang di mata masyarakat. Saat ini anak jalanan menjadi masalah yang serius terutama di Ibu Kota Provinsi dan Kota-kota besar termasuk Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program penanganan anak jalanan di Kota Makassar serta metode pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan di Kota Makassar.

Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Jalanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui wawancara dan tahap akhir dengan menarik kesimpulan atau observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang diukur berdasarkan teori Charles O. Jones terkait indikator organisasi, intepretasi dan aplikasi (penerapan) belum mampu diterapkan secara efektif oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Metode pembinaan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 adalah pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial. Dari hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran ke jalanan untuk mengais rezeki juga masyarakat yang belum mengetahui larangan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Anak Jalanan, Implementasi, Pembinaan

ABSTRACT

Yuniarti Miftahul Jannah, Implementation of the Street Children Handling Program at the Makassar City Social Service. (supervised by Drs. Natsir Tompo, M.Si and Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.)

The problem of street children is in the public spotlight and needs the attention of the central and local governments to overcome them. Street children are a social problem whose existence is often felt very unpleasant and disturbing many people in the eyes of society. Currently street children are a serious problem, especially in provincial capitals and big cities, including Makassar City.

This study aims to determine how the implementation of the program for handling street children in the city of Makassar and the method of guidance provided for the handling of street children in the city of Makassar.

The informants of this study consisted of the Head of the Section for the Development of Street Children and Street Children. The type of research used is a descriptive qualitative approach. The data analysis technique is done by collecting information through interviews and the final stage by drawing conclusions or observations.

The results showed that the implementation of policies measured based on Charles O. Jones' theory related to organizational indicators, interpretation and application (application) had not been able to be applied effectively by the Makassar City Social Service. The coaching method provided in accordance with the Makassar City Regional Regulation No. 2 of 2008 is prevention, follow-up and social rehabilitation. From the results of the study, it shows that there are still many street children who roam the streets to earn sustenance as well as people who do not know the prohibition against giving money to street children.

Keywords: Social Service, Street Children, Implementation, Coaching

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di berbagai bidang dan oleh sebab itu peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun telah mempengaruhi sistem budaya dan sistem nilai bangsa. Secara kasat mata, arus pertumbuhan dan perkembangan berjalan lancar dan merupakan kebanggaan negara, padahal sebenarnya telah terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Disatu sisi banyak dibangun gedung-gedung megah dan mewah, namun disisi lain terdapat celah-celah kehidupan yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan kaum miskin yang semakin meningkat jumlahnya baik di perkotaan maupun pedesaan.

Kesenjangan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia seringkali dikatakan sebagai salah satu gejala sosial yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Perbedaan yang sangat mencolok pada masa perkembangan seperti ini seringkali secara fisik tidak diimbangi dengan perkembangan moral negara yang dapat menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis yang terjadi beberapa tahun terakhir ini juga menimbulkan kesan dalam bentuk permasalahan baru dibidang sosial. Krisis ekonomi selalu menimbulkan krisis sosial

dimana kelompok ekonomi yang paling lemah melahirkan banyak anak jalanan.

Masalah anak jalanan menjadi sorotan publik dan perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang keberadaannya seringkali dirasakan sangat tidak menyenangkan dan meresahkan banyak orang di mata masyarakat. Saat ini anak jalanan menjadi masalah yang serius terutama di Ibu Kota Provinsi dan Kota-kota besar termasuk Kota Makassar. Keberadaan mereka seringkali menimbulkan masalah lalu lintas, ketertiban umum dan keamanan.

Anak adalah berkat sekaligus amanah dari Allah swt. lahir untuk dididik. Anak-anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa perlu mendapat perhatian yang serius, karena kemajuan dan kemunduran suatu negara akan sangat bergantung pada generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, kesejahteraan anak harus diutamakan agar lahir generasi penerus yang berkualitas. Jika anak tidak mendapatkan hak dan perlindungan sosialnya sebagai salah satu pilar bangsa, maka mereka akan cenderung mengalami masalah atau menjadi masalah.

Anak jalanan merupakan salah satu contoh masalah sosial yang ada di Indonesia. Mereka merupakan generasi yang sangat rentan, berbagai pengaruh dari luar masih bisa masuk dengan bebas untuk mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka karena mereka masih anak-anak. Kehidupan di jalanan merupakan kehidupan yang tidak boleh dirasakan

oleh anak jalanan, pengaruh buruk yang dapat mempengaruhi perilakunya dapat membuat mereka melakukan kejahatan, seperti mencuri, merampok, mencopet, dll.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat hingga 2019 sebanyak 183.104 anak dengan rincian 6.572 AMPK, 8.320 Anjal, 8.507 Balita, 92.861 AMPFS dan 64.053 Anak Terlantar. Berdasarkan keberadaannya, dari 183.104 anak tersebut terdiri dari 106.406 Anak di Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan 76.698 anak di dalam keluarga. (Rehsos, 2020 dalam <https://kemosos.go.id>)

Anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau tinggal di jalan dan tempat-tempat umum seperti stasiun kereta, mall, terminal bus, SPBU, dll. Anak jalanan dalam konteks ini adalah anak yang berusia antara 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan suatu keharusan yang harus mereka terima karena alasan tertentu.

Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalanan secara tidak langsung mengabaikan hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Anak jalanan sebenarnya harus turun jalan pada saat mereka harus bersekolah, mengenyam pendidikan, bermain dengan teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat mendukung tumbuh kembangnya sebagai manusia. Beberapa anak jalanan di Kota Makassar bergantung pada pembersihan kaca mobil menggunakan kemoceng atau kain saat

lampu lalu lintas menyala merah. Ada juga yang menjual tisu atau koran dan mengemis kepada pengguna jalan.

(W, n.d. dalam *HTML Document*, 2008 hlm. 28), anak jalanan seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya, agar menjadi manusia yang bermanfaat dan mempunyai masa depan yang cerah. Tidak tercuali juga dengan anak jalanan, mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengasah bakat yang ada dalam diri mereka. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Secara umum, anak jalanan disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pendidikan dari orang tua serta pengaruh ekonomi. Kemiskinan menyebabkan banyak orang tua meninggalkan anaknya bekerja di kota atau tempat lain. Padahal, bagaimanapun juga, setiap orang tua harus bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,

mendidik, dan melindungi anak”. Namun kenyataannya, masih banyak anak yang tidak mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tuanya.

Langkah awal yang harus disadari oleh semua pihak dalam menangani anak jalanan adalah bahwa anak jalanan bagaimanapun kondisinya adalah anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara. Tidak semua anak jalanan turun ke jalan karena tekanan ekonomi, faktor lain seperti pergaulan, perlarian, tekanan dari orang tua, atau atas dasar pilihan sendiri.

Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan (Depsos RI, 2008:1), permasalahan anak jalanan dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya: 1) anak jalanan yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami oleh anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga muda menikah, dan anak yang tidak diketahui asalnya (anak yang ditelantarkan orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam pengasuhan, seperti anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; dan 3) anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti anak gizi buruk dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Itulah yang terjadi pada anak jalanan.

Selain itu, anak-anak yang bekerja sebagai pekerja informal bukan hanya karena miskin, tetapi lebih pada masalah mental, mereka tidak memiliki semangat atau motivasi untuk memikirkan masa depan mereka, mereka mudah terpengaruh oleh seruan orang dewasa untuk dieksploitasi sebagai pengemis. Selain itu, orang tua mereka belum berperan penting

dalam mengembangkan mentalitas anak jalanan sehingga kehidupan mereka semakin terpuruk.

Pemerintah Kota Makassar memiliki kebijakan dalam upaya menanggulangi anak jalanan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Pembinaan Anak Jalanan didukung Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan instansi terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tujuan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan, ketertiban dan ketentraman umum melalui kepastian hukum yang akan melindungi masyarakat agar dapat hidup damai dan tentram serta membangun keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan menjalankan sebuah pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap anak jalanan dengan melakukan operasi penertiban yang terjaring dalam patroli TRC (Tim Reaksi Cepat) Saribattang, membangun Posko Pelayanan Terpadu Penanganan Anak Jalanan, Gepeng, dan Pengemis.

Kepala Seksi Anjal dan Gepeng Dinas Sosial Kota Makassar, Kamil mengaku hanya sebagian kecil dari razia yang berhasil ditangkap Dinas

Sosial. Sementara jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis terus mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan selama periode Januari-Juli 2020, petugas berhasil menjaring 268 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun angka ini turun pada bulan Juni, lalu kembali meningkat pada bulan Juli. (Indriani, 2020 dalam <https://makassar.sindonews.com/>).

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anak Jalanan di Kota Makassar
Pada Tahun 2018-2020**

No.	Tahun	Anak Jalanan
1	2018	232
2	2019	191
3	2020	268
	Jumlah	691

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan ketidakstabilan jumlah anak jalanan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 saat ini. Pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah anak jalanan sebanyak 41 orang dari tahun 2018 sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan jumlah pada tahun 2019, jumlah anak jalanan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebanyak 77 orang anak jalanan dari tahun 2019 sebelumnya.

Adanya perubahan arah kebijakan di awal tahun 2021 dengan beralihnya pimpinan baru Kadis Sosial Kota Makassar sehingga sejumlah kegiatan sempat tertunda. Akibatnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis kian membeludak. Kepala Seksi Anjal dan Gepeng Dinas

Sosial Kota Makassar, Kamil mengatakan, saat ini pihak Dinas Sosial belum melakukan tindakan secara serius kepada anak jalanan dan gepeng di Kota Makassar. Beliau juga menyampaikan, akan ada posko khusus menangani persoalan anak jalanan dan gepeng di Jl. Pengayoman dan Fly Over, untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas disana. Sementara, Plh. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Asvira Anwar mengharapkan adanya penindakan secara komprehensif terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Makassar. Salah satu caranya dengan menghadirkan Lingkungan Pondok Sosial (Lipsos). Hanya saja pengadaan Lipsos sebagai salah satu upaya kongkret mengurangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis tahun 2021 ini dilaporkan luput dari penganggaran. (Syam, 2021 dalam <https://makassar.tribunnews.com>)

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto tengah menyiapkan program yang merangkul anak jalanan dan orang terlantar. Danny menilai mereka memiliki potensi dan bakat yang bisa dikembangkan. Pada periode sebelumnya, Danny mengatakan sudah mencetuskan program serupa namun tak berjalan maksimal. Danny mengatakan bahwa di Makassar Recover ini, beliau akan kembali memacu program tersebut agar ada edukasi bagi mereka *Selasa, 16 Maret 2021. Hal itu beliau sampaikan saat berbincang dengan Balai Perumahan Kelas 1A Makassar. Danny menyebut dirinya berkomitmen untuk memberikan ruang khusus bagi anak jalanan yang berhadapan dengan

hukum. Program yang dimaksudkan beliau bersifat ramah dan tidak ada unsur paksaan. (Kamsah, 2021 dalam <https://makassar.terkini.id>)

Disisi lain, Walikota Makassar melalui Plh. Kadis Sosial Kota Makassar, mengintruksikan TRC Saribattang untuk bekerja ekstra dalam penanganan anjal dan gepeng yang semakin menjamur di Kota Makassar. Kepala Bidang Rehsos memimpin langsung patroli anjal dan gepeng bersama Sat Sabhara Polrestabes Makassar beserta BKO Satpol PP Kota Makassar. (**Instagram: humas_dinsos.makassarkota**)

Namun, masalah meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis menyebabkan penanganannya tidak maksimal dan efektif. Oleh karena itu penulis akan mengkaji sejauh mana program-program tersebut mampu memberdayakan anak jalanan. Untuk mengatasi masalah anak jalanan, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan secara partisipatif. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui tingkat efektivitas program penanganan anak jalanan.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program penanganan anak jalanan Di Kota Makassar?
2. Bagaimana model pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan?

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah dan memperoleh hasil yang optimal. Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada penelitian ini. Penulis membatasi penelitian pada implementasi program penanganan anak jalanan yang dijalankan. Selain keterbatasan tersebut, penulis membatasi penelitian pada efektif atau tidaknya program yang dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008 serta metode pembinaan yang diberikan kepada anak jalanan. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah dan memperoleh hasil yang optimal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi program penanganan anak jalanan Di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui model pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai efektivitas pelaksanaan program penanganan anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Makassar.
- 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai penanganan anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Makassar.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Makassar untuk memaksimalkan program-program dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar.
- 2) Bagi peneliti, dapat memperoleh pengetahuan serta peningkatan kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan setiap hari terhadap praktik lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengarah pada perubahan, karena dengan implementasi terdapat tindakan langsung yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004:64) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang berdampak atau berpengaruh pada sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat tersebut dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Menurut (Agustino, 2008), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas

atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier Abdul Wahab, (2008:65), mengatakan bahwa:

“Implementasi ialah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu program atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, sehingga akan dinilai apakah perlu dilakukan evaluasi terhadap program atau kebijakan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses yang sangat penting jika berbicara tentang implementasi program baik itu sosial maupun dalam dunia pendidikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012: 149-150) pembatasan pelaksanaan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Nugroho (2014:657), implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Alasan diperlukannya implementasi kebijakan mengacu pada pandangan para pakar ahli bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan.

Untuk memperjelas pengertian tentang implementasi kebijakan publik, ada dua pendekatan yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan dilakukan secara terpusat dari aktor pusat, dan keputusan diambil dari pusat. Pendekatan *top down* dimulai dari sudut pandang bahwa keputusan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengambil kebijakan harus dilakukan oleh pelaksana di tingkat bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

3. Indikator Implementasi

Jones (1996:166) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu program dengan memperhatikan tiga kegiatan pokok. Menurut Jones, ketiga aktivitas ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketiga aktivitas tersebut adalah:

- a. Organisasi**, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit dan metode untuk mendukung operasi program;

b. Interpretasi, menginterpretasikan program agar menjadi rencana dan arah yang sesuai dan akan diterima dan dilaksanakan; dan

c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Secara lebih detail mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), penulis mengartikannya sebagai berikut.

a. Pertama, kegiatan pengorganisasian (*organization*) adalah upaya untuk menyusun dan menata kembali sumber daya, sarana dan prasarana yang mengarah pada upaya untuk memahami (mewujudkan kebijakan menjadi arahan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Jones (1994:166 dalam ponto, M. auldrin, novie R. ploh, 2016:41), mengatakan organisasi adalah “kegiatan yang bertautan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, serta sarana dan prasarana untuk menjadikan program berjalan”.

b. Kedua, kegiatan interpretasi adalah kegiatan untuk menjelaskan substansi suatu kebijakan dalam suatu bahasa yang lebih operasional dan lugas untuk dipahami, agar

substansi kebijakan tersebut di implementasikan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan. Menurut Jones (1994: 320 dalam ponto, M. auldrin, novie R. pioh, 2016:46), mengatakan mereka yang menerapkan keputusan atau kebijakan haruslah tau apa yang seharusnya mereka lakukan.

- c. Ketiga, aplikasi atau penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Oleh sebab itu, Jones (1994: 320 dalam ponto, M. auldrin, novie R. pioh, 2016:47) mengatakan *aplication* adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Kegiatan aplikasi adalah kegiatan memberikan layanan rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan yang ada.

Berdasarkan apa yang dikatakan Jones diatas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program menjadi lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang membutuhkan tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

B. Program Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

United Nation Children's Fund (UNICEF) (dalam putra, fikriryandi, n.d. hlm. 54) mengemukakan defeni dari anak jalanan adalah sebagai berikut: "Anak jalanan ialah anak-anak yang berusia dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya".

Menurut (Indonesia, 2001), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-sehari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Adapun menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia (2001:30 dalam ramadhani, M, Sarbaini, 2016:947), anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun.

Ada yang menganggap anak jalanan dapat masuk ke area pekerja anak, tetapi ada juga yang menolaknya. Secara konseptual anak jalanan termasuk dalam pekerja anak, namun secara penerapan anak jalanan lebih banyak dianggap sebagai kelompok khusus yang memiliki banyak perbedaan dari pekerja anak. Oleh sebab itu, anak jalanan ialah anak yang dipaksa eksistensinya oleh suatu keadaan

yang mereka sendiri tidak menghendaknya, sehingga membuat dirinya harus mempertahankan eksistensinya sebagai layaknya manusia dewasa untuk terus hidup dengan bekerja apa saja, dimana saja, dan kapan saja mereka bisa (Astri, 2014:147).

Suyoto, 2010:185 (dalam putra, fikriryandi, n.d. hlm. 55) mendefinisikan anak jalanan yang lebih menitikberatkan kepada hal-hal yang dihadapi oleh anak jalanan, sebagai berikut: “Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisihkan, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan kadang tidak bersahabat”.

Anak jalanan, *tekyan*, *arek kere*, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri, sebenarnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat.

Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang

benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena biasanya mereka memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

2. Kategori Anak Jalanan

Menurut Surbakti dkk. (dalam Suyanto, 2010:200-201) berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi—sebagai pekerja anak—di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orang tuanya. Anak jalanan berfungsi sebagai memperkuat penyangga ekonomi keluarga yang tidak dapat ditanggung oleh orang tuanya.
2. *Children of the street*, adalah anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Kebanyakan dari mereka ialah anak-anak yang mengalami kekerasan atau lari dari rumah dan sebagian besar masih mempunyai hubungan dengan orang tuannya.
3. *Children from families of the street*, adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalan. Walaupun anak-

anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu ke tempat yang lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi—bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya—walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSNI, 2000: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

1. *Anak jalanan yang hidup di jalanan*, dengan kriteria:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang;
 - c. Tidak lagi sekolah;
 - d. Rata-rata berusia dibawah 14 tahun.
2. *Anak jalanan yang bekerja di jalanan*, dengan kriteria:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-16 jam berada di jalanan

- c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh;
 - d. Tidak lagi sekolah;
 - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pemulung, penyemir, dll.;
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. *Anak yang rentan menjadi anak jalanan*, dengan kriteria:
- a. Bertemu setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. 4-5 jam bekerja di jalanan;
 - c. Masih bersekolah;
 - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll.;
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.
4. *Anak jalanan berusia di atas 16 tahun*, dengan kriteria:
- a. Tidak lagi berhubungan atau mempunyai hubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-24 jam berada di jalanan;
 - c. Tidur di jalanan atau rumah orang tua;
 - d. Tamat SD / SMP, namun tidak bersekolah lagi;
 - e. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.

Anak jalanan memiliki ciri khusus baik secara fisik maupun psikis. Menurut (Indonesia, 2001), karakteristik anak jalanan pada

ciri-ciri fisik dan psikis, yakni: 1) Ciri fisik: kulit kusam, rambut kemerahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terawat, dan 2) Ciri psikis: mobilitas tinggi, acuh tak acuh, curiga, sangat sensitif, pemarah, serta kreatif.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Anak Jalanan

Anak jalanan di perkotaan tidak muncul begitu saja tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. (Astri, 2014:148) mengungkapkan bahwa penyebab munculnya anak jalanan meliputi tingkat mikro, meso, dan makro, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat mikro (*Immediate causes*)

Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga berdiri sendiri, yakni:

- a. Lari dari keluarga, dipaksa bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualang, bermain-main atau diajak teman.
- b. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua

2. Tingkat meso (*underlying causes*)

Yakni faktor di masyarakat seperti kebiasaan mengajarkan untuk bekerja sehingga suatu saat menjadi keharusan dan kemudian meninggalkan sekolah, kebiasaan

pergi ke kota untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan di daerahnya.

3. Tingkat makro (*basic causes*)

Yakni faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti peluang pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian yang besar, urbanisasi, biaya pendidikan yang tinggi dan perilaku guru yang diskriminatif, belum adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

4. Model Penanganan Anak Jalanan

Menurut Tata Sudrajat 1996 (dalam Suyanto, 2010:214) selama ini beberapa pendekatan yang lazim dilakukan oleh LSM dalam menangani anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. *Street Based*

Model penanganan anak jalanan dimana anak jalanan berasal atau tinggal, kemudian *street educator* mendatangi mereka, berdiskusi, menemani mereka dalam bekerja, memahami dan menerima situasinya, dan memposisikan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak diberikan materi pendidikan dan keterampilan, selain itu anak jalanan mendapatkan hubungan yang hangat dan perhatian yang akan menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang bermanfaat untuk mencapai tujuan intervensi.

2. *Centre Based*

Pendekatan tersebut adalah penanganan anak jalanan di panti. Anak-anak yang diikutsertakan dalam kebijakan ini dikumpulkan dan diberikan pelayanan di panti seperti makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan ramah dari pekerja sosial. Di panti asuhan permanen, layanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, seni, dan pekerjaan disediakan untuk anak-anak jalanan.

3. *Comuunity Based*

Dalam penanganan berbasis masyarakat melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yaitu mencegah anak masuk dan jatuh ke kehidupan di jalanan. Keluarga diberikan kegiatan sosialisasi tentang pengasuhan anak dan upaya peningkatan taraf hidup, sedangkan anak diberi kesempatan mengenyam pendidikan formal maupun informal, mengisi waktu luang, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas kekuatan keluarga dan masyarakat agar siap melindungi, merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara mandiri.

Tabel 2. Pendekatan dan Penanganan Anak Jalanan

Pengelompokan Anak Jalanan	Model Intervensi	Fungsi Intervensi
Anak yang masih berhubungan atau tinggal dengan orang tua	Community based	Preventif
Anak yang masih ada hubungan dengan keluarga tetapi jarang berhubungan/tinggal dengan orang tua	Street based	Perlindungan
Anak tersisih/putus hubungan dengan keluarga/orang tuanya	Centre based	Rehabilitasi

Sumber: Tata Sudrajat, YKAI Jakarta, 1996

Dari berbagai pendekatan yang telah diuraikan, tidak berarti satu pendekatan yang ada lebih baik dari pendekatan yang lain. Pendekatan mana yang dipilih dan lebih tepat, akan banyak ditentukan oleh kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi anak jalanan. Hanya, satu hal yang penting dicatat: pendekatan apapun yang dipilih, secara keseluruhan modal awal yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan anak jalanan sesungguhnya adalah sikap empati dan komitmen yang benar-benar tulus dari kita semua.

5. Pembinaan

(Syaepul, 2017. hlm 52), pembinaan didefinisikan sebagai: Upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuannya sebagai bekal

untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.

(Aruan, 2019:1175) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

1. Mengatur strategis, yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
3. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus di organisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.

4. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1, menjelaskan bahwa:

“Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.”

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Bab II Pasal 3, Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warna negara yang harus dihormati;
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;

- e. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Indikator Pembinaan

Untuk mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah, pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial.

1) Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan teratur untuk menghentikan kemunculan anak jalanan melalui pemantauan, pengawasan dan pengendalian, pendataan, dan sosialisasi, untuk mengembangkan kelebihan anak jalanan. Pembinaan yang dimaksud meliputi:

a. Pendataan

Pendataan ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk pelaksanaan pendataan ini menyelenggarakan instrumen pendataan yang berisi nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan masalah utama yang dihadapi.

b. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan diselenggarakan dengan cara patroli pada tempat-tempat umum serta memantau lokasi anak jalanan dalam melakukan aktivitasnya.

c. Sosialisasi

Sosialisasi diselenggarakan oleh instansi terkait, antara lain: Sosialisasi langsung, diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait serta dapat bekerja sama dengan tim, organisasi sosial melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak dan elektronik.

2) Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lebih lanjut diberikan dalam upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak-anak jalanan. Pembinaan lebih lanjut dilaksanakan dengan cara:

a. Perlindungan

Perlindungan ini diberikan untuk menghentikan anak jalanan turun ke jalan dengan mengadakan posko di jalan dan tempat-tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis sering melakukan kegiatannya.

b. Penampungan Sementara

Penampungan sementara ini diselenggarakan dalam rangka pembinaan yang meliputi pembinaan sosial, pembinaan mental spiritual, pembinaan hukum dan permainan adaptasi sosial.

c. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*assesment*)

Pengungkapan dan pemahaman masalah dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

3) Rehabilitasi Sosial

Upaya Rehabilitasi Sosial dapat berupa proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial agar penyandang masalah kesejahteraan dapat siap menjalankan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat dan negara. Upaya rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia produkti dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Bimbingan mental spiritual, diselenggarakan untuk membangun tingkah laku dan perilaku individu dan sesuai dengan peraturan yang terjadi di masyarakat

yang melingkupi pembinaan agama, pembinaan akhlak dan pembinaan pada prosedur kehidupan.

- b. Bimbingan fisik, termasuk pelatihan fisik dan pemeriksaan kesehatan.
- c. Bimbingan sosial, upaya untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dengan mengembangkan pemahaman dan tanggung jawab individu.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka selama tinjauan pustaka ini peneliti mencatatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Mulianti (2017)

Penelitian Mulianti (2017), berjudul *“Revitalisasi Program Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar.*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani anak jalanan di Kota Makassar antara lain, minimnya anggaran APBD sehingga penanganan tidak dapat dilakukan secara optimal. Tidak ada Panti Sosial khusus untuk anak jalanan,

meskipun merubah pola pikir anak jalanan tidak cukup hanya dengan satu kali imbauan saja tetapi membutuhkan pembinaan jangka panjang. Tinggi rendahnya tingkat ekonomi akan sangat mempengaruhi penanganan anak jalanan, karena apapun tindakan pemerintah yang melarang anak jalanan tidak akan banyak berpengaruh jika sedang berbicara tentang ekonomi.

2. Hasil Penelitian Jonathan Tribuwono (2017)

Penelitian Jonathan Tribuwono (2017), berjudul *“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)”*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 belum dapat dilaksanakan secara efektif karena tujuan dari Perda belum ada yang tercapai secara maksimal. Kemudian untuk Satpol PP yang bertugas rata-rata sudah cukup tua sehingga patroli yang dilakukan setiap hari kurang maksimal. Komunikasi dan koordinasi Dinas Sosial dengan pihak yang terkait masih kurang, terbukti hanya YKP2N yang masih berperan aktif dalam rehabilitasi meskipun Dinas Sosial sendiri mengaku kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan.

3. Hasil Penelitian A. Maunawan Tenrisui (2019)

Penelitian A. Maunawan Tenrisui (2019), berjudul *“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa implementasi kebijakan terkait anak jalanan pada Perda Nomor 2 Tahun 2008 untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye masih sangat kurang. Sementara kegiatan tersebut merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat yang sangat dibutuhkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Kemudian, penampungan sementara yang masih perlu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi sebagai pemilik panti sosial seperti yang disebutkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2008 pasal 14 ayat (1).

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Mulianti (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Revitalisasi Program Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota	1. Bagaimana program Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar? 2. Bagaimana revitalisasi dari program Dinas	Dengan hasil penelitian Dinas Sosial Kota Makassar memiliki beberapa program yang telah direvitalisasi, diantaranya program

		Makassar (2017)	Sosial Kota Makassar dalam penanganan anak jalanan? 3. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menangani anak jalanan di Kota Makassar?	pembinaan dengan melakukan patroli telah direvitalisasi berubah menjadi Team Reaksi Cepat (TRC) Saribattang. Hambatan yang dihadapi pemerintah yaitu, kurangnya anggaran APBD sehingga penanganan anak jalanan tidak terlaksana dengan maksimal.
2.	Jonathan Tribuwono (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin)	Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial) (2017)	1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar?	Dengan hasil penelitian, implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, belum mampu di implementasikan secara efektif berdasarkan tujuan dan sasaran dari Perda belum ada yang dapat tercapai secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi Dinas Sosial dengan pihak yang terlibat juga masih kurang.
3.	A. Maunawan Tenrisui (Fakultas	Implementasi Kebijakan Pembinaan	1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengimplementa	Dengan hasil penelitian implementasi kebijakan terkait

	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin)	Anak Jalanan Di Kota Makassar (2019)	sikan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar?	anak jalanan pada Perda No. 2 Tahun 2008 untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye masih sangat kurang.
--	--	--------------------------------------	--	---

(Sumber: Hasil Olah Data 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peneliti mengambil tiga contoh penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya mengenai implementasi kebijakan dalam menangani anak jalanan serta hambatan atau faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Adapun penulis sendiri memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar?
2. Bagaimana model pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan?

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pada fokus serta rumusan masalah penelitian. Dapat dilihat persamaannya terletak pada tema yang akan dibahas, yaitu mengenai penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

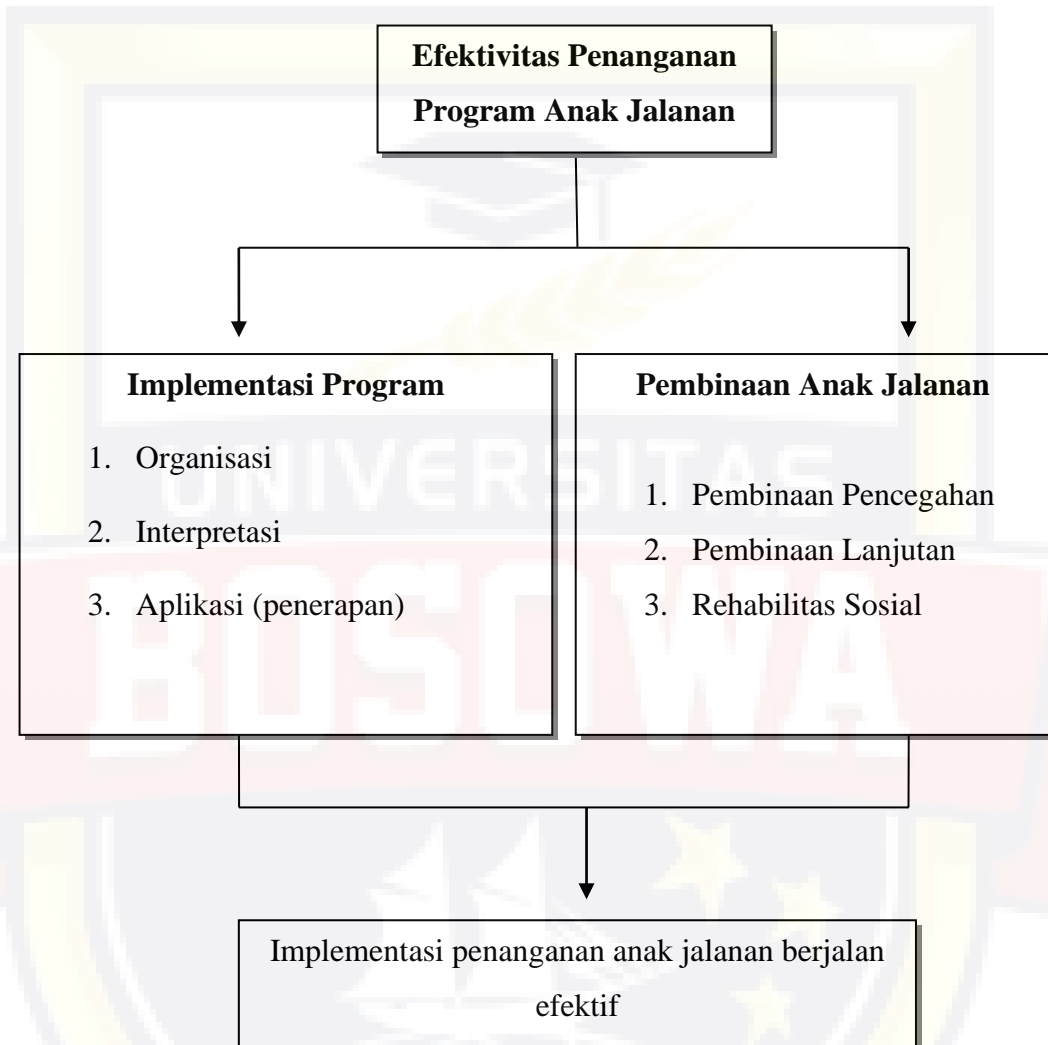
D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep yang mendukung penelitian yang dijadikan pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis. Kerangka konseptual memandu peneliti untuk secara sistematis menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian.

Munculnya fenomena anak jalanan dapat berupa ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi fungsi pemenuhan kebutuhan dasar (biologis), fungsi kasih sayang (psikologis) dan fungsi pemenuhan kebutuhan bermasyarakat (sosial). Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka mendorong anak-anak untuk turun ke jalan dan berusaha mendapatkan kebutuhan tersebut dari anggota kelompok atau orang dewasa lainnya yang ditemui di jalan.

Efektivitas program sangat penting untuk mengetahui sampai mana keberhasilan sebuah program karena selama ini banyak program yang berjalan tetapi anak jalanan masih meningkat, setelah program selesai peserta binaan kembali menjadi anak jalanan. Dalam melihat sejauhmana efektivitas program yang menjadi sasaran utama penelitian yang akan dilaksanakan, penulis menggunakan konsep implementasi kebijakan dimana dalam penelitian ini keberhasilan efektivitas program melalui Dinas Sosial Kota Makassar, apakah sesuai dengan kebutuhan anak jalanan yang menentukan perubahan perilaku anak jalanan serta pembinaan anak jalanan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada implementasi program penanganan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan indikator sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:
 - a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Adapun indikator organisasi, sebagai berikut:
 - 1) Sumber daya
 - 2) Sarana dan prasarana
 - b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Adapun indikator interpretasi, sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan program
 - c. Aplikasi: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan

program. Adapun indikator aplikasi (penerapan), sebagai berikut:

- 1) Standar dan Sasaran kebijakan
- 2) Pelaksanaan program

2. Anak jalanan telah menjadi masalah sosial dan penanganannya sangat penting untuk dilakukan, disamping hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang telah dilindungi oleh undang-undang, juga untuk menghindari dampak negatif apabila masalah anak marginal ini tidak dapat terpecahkan. Untuk melindungi hak dan kepentingan anak jalanan yang disebabkan oleh berbagai faktor, mereka harus dibina yang menjadi tanggung jawab pemerintah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yang antara lain pembinaan, sebagai berikut:

a. Pembinaan pencegahan ialah bentuk awal dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan, jumlah penyebaran dan permasalahan penyebab adanya anak jalanan. Adapun indikator pembinaan pencegahan, sebagai berikut:

- 1) Pendataan
- 2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 3) Sosialisasi

b. Pembinaan lanjutan merupakan kegiatan secara terencana dengan maksud mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, yang dilangsungkan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara yang dilakukan dengan sistem pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi anak jalanan. Adapun indikator pembinaan lanjutan, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan
- 2) Penampungan sementara
- 3) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah
(*assesment*)

c. Rehabilitas bertujuan untuk memastikan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitas sosial ini meliputi: bimbingan mental, bimbingan fisik, dan bimbingan sosial.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Menurut Sugiyono dalam bukunya mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.” (Sugiyono, 2010:1)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif yakni penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Dalam studi ini para peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. Tujuannya adalah menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *curreent status* subjek yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Makassar dengan mengambil area anak yang berprofesi mencari nafkah di jalanan. Peneliti mengambil sampel dengan memilih kawasan operasional anak jalanan. Lokasi umum seperti Jl. Abdullah Daeng Sirua, Jl. Kakatua, dan Jl. Pengayoman. Lokasi penelitian selanjutnya yaitu di Dinas Sosial Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim, sebagai dinas yang berkepentingan dalam menangani anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dengan maksud tidak selalu mewakili seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup dan siap menjelaskan situasi tertentu dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan. Menurut (Sugiyono, 2010:300), teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini, misalnya yang diperhitungkan untuk memahami dengan baik tentang apa yang kita harapkan, atau bahkan dia adalah penguasa, sehingga memudahkan peneliti mengeksplorasi hal/situasi sosial yang diteliti.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan memperhatikan keterkaitan antara informan dengan penelitian. Adapun yang menjadi informan selama penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pemulung
2. Anak Jalanan

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Nasution (dalam Sugiyono, 2010:61) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Dalam penelitian ini, instrumen yang akan digunakan dalam penelitian pelaksanaan program penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi terstruktur yang dibuat sendiri oleh peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling banyak digunakan dalam penelitian, karena tujuan penelitian yang paling banyak adalah untuk mendapatkan data. Sesuai dengan (Sugiyono, 2012:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian yang paling utama adalah untuk mengumpulkan data.

Dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung menemui anak jalanan yang berada disekitar jalan umum yang bekerja pada waktu-waktu tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung hal yang diteliti ditengah catatan yang diperlukan. Konsisten dengan (Sugiyono, 2015:145), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Dalam penelitian kualitatif, observasi dilihat karena nafas suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh data yang diharapkan, namun peneliti harus dilatih sebelum melakukan observasi agar menghasilkan data yang baik.

2. Wawancara

Wawancara yakni teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan informan. Menurut Riyanto (2010:82), wawancara merupakan metode pengumpulan data yang membutuhkan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek atau responden.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka, sesuai dengan (Nazir, 2013:93) teknik pengumpulan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang perlu dilakukan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Sistem ini digunakan untuk mendapatkan dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang

dilengkapi dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang biasa digunakan untuk menelusuri *historis* (Bungin, 2009:122). Menurut (Syaodih, 2012:221), mengemukakan bahwa studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Metode ini dapat menjadi metode pengumpulan data yang mengarah pada catatan-catatan penting tentang hal yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, valid, dan tidak dapat diprediksi.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data dan setelah menyelesaikan pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Pada tahap analisis sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015:249) infonya merupakan analisis interaktif dimana terdapat 4 (empat) komponen utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data terjadi. Pada saat melakukan wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban narasumber.

Jika solusi narasumber setelah dianalisis tidak memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi, hingga diperoleh data yang dianggap kredibel pada tahap tertentu. Setelah peneliti mengumpulkan infonya, peneliti melakukan proses antisipatif sebelum mereduksi infonya. Pengurangan data antisipatif terjadi ketika penelitian memutuskan kerangka kerja konseptual mana, situs web mana, pertanyaan penelitian mana, pendekatan pengumpulan data mana yang harus diselesaikan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut (Sugiyono, 2015:249), reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas serta mendalam. Mereduksi data berarti meringkas, memilih banyak hal, yang mengkhususkan diri pada hal-hal penting, mencoba menemukan tema dan pola. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian kualitatif yang paling objektif adalah temuan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono, 2015:249), menyatakan “*The most frequent sort of display data for qualitative research data within the past has been narrative text*”.

Yang paling sering menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal menyaranakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke sektor untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disarankan adalah kesimpulan yang kredibel.

I. Teknik Keabsahan Data

Data hasil wawancara dan jawabannya tersebut kemudian diuji atau dicek keabsahannya dari data penelitian kualitatif. Teknik validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data sering kali dinyatakan kredibel jika terdapat kemiripan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada hal yang diteliti. Uji kredibilitas data bertujuan untuk menilai validitas temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas mengungkapkan kepercayaan

dalam data dari hasil penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bermakna peneliti kembali ke tempat penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan informan yang ditemui maupun informan baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, lebih banyak keterbukaan, rasa saling percaya) antara peneliti dan narasumber agar tidak ada informasi lagi yang tersembunyi. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b. Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan observasi dengan lebih cermat dan terus menerus. Selama ini, kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, dengan meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat mengecek ulang apakah data yang ditemukan tersebut salah atau tidak.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda-beda. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan pengecekan data yang telah didapatkan melalui sebagian sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan pengecekan data ke sumber yang sama dengan cara yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi dalam waktu situasi yang berbeda.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah bahan yang mendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Alat bantu pencatatan data dalam penelitian kualitatif seperti camera, camcorder, alat perekam suara dibutuhkan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti..

e. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dari hasil penelitian sampai suatu titik tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti berusaha mencari data yang berbeda atau mungkin bertentangan dengan informasi yang telah ditemukan.

Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, itu berarti informasi yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuan dari *member check* adalah untuk mengetahui sejauh mana info yang didapat sesuai dengan apa yang diberikan oleh penyedia info tersebut. Pelaksanaan *member check* sering dilakukan setelah periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat temuan, atau kesimpulan.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferability merupakan landasan eksternal dalam penelitian kuantitatif. Kriteria *transferability* menanyakan sejauh mana kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk digeneralisasikan atau dialihkan. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan pekerjaan yang menggambarkan konteks penelitian dan oleh karena itu asumsi yang menjadi inti penelitian.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Penelitian yang andal yakni ketika peneliti lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian. Secara

mendasar berhubungan dengan apakah peneliti akan memperoleh hasil yang sama jika peneliti melakukan pengamatan yang sama untuk kali yang kedua.

4. Uji Konfirmabilitas (*Konfirmability*)

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu diubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi maupun di kabupaten/kota madya. Pada akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22.24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50, Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

Sulawesi Selatan 90211. Berada pada tanah seluas 499m2 dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka visi dan misi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Visi Dinas Sosial Kota Makassar

Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah **‘pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat’**.

Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Misi Dinas Sosial Kota Makassar

- 1) Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat;
- 2) Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung;
- 3) Mengembangkan sistem perlindungan sosial;
- 4) Melakukan jaminan sosial;
- 5) Pelayanan rehabilitas sosial secara optimal;
- 6) Mengembangkan pemberdayaan sosial.

c. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (struktural dan fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/*stakeholders* khususnya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Orsos serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Makassar sebagai berikut.

4. Kepala Dinas

5. Sekretaris

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perlengkapan

6. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

- a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
- b. Seksi Pembinaan Keluarga dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

7. Bidang Rehabilitas Sosial

- a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

- c. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pemulung.

8. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
- b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

9. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- b. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
- c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknik Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar.

B. Identitas Informan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa representasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian

ini. Maka untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan:

1. Kamil Kamaruddin SE.

Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar yang mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pemulung. Beliau memiliki peran besar sebagai pembina anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

2. Fahmi

Fahmi merupakan informan dalam kategori anak jalanan yang berusia 10 tahun. Fahmi melakukan kesehariannya dengan menjadi tukang parkir Indomaret Abdesir setiap pulang sekolah. Penghasilan yang didapatkan oleh Fahmi sekitar Rp50.000-Rp90.000 yang ia gunakan untuk jajan dan ditabung kepada orang tuanya. Orang tua Fahmi bekerja sebagai tukang batu dan ibu rumah tangga, dengan kondisi perekonomian yang lemah Fahmi yang bercita-cita sebagai polisi ingin membantu penghasilan orang tuanya.

3. Abi

Abi adalah anak jalanan yang berada di lampu merah Kakatua-Ratulangi. Ali mengais rezeki dengan menjadi tukang lap mobil menggunakan kemoceng atau kain lap. Abi yang saat

ini berusia 13 tahun sedang menempuh pendidikan kelas 1 di salah satu SMP swasta yang ada di Kota Makassar. Orang tua Abi bekerja sebagai penjual kerupuk. Demi membantu perekonomian keluarga Abi yang bercita-cita menjadi polisi, mengais rezeki dari pagi hingga malam tiba dengan penghasilan kurang lebih Rp50.000-Rp100.000.

4. Nabil Syam

Sejak februari 2021, Nabil Syam memulai profesi menjadi anak jalanan hingga sekarang. Nabil yang berusia 10 tahun mencari rezeki dengan menjadi tukang lap mobil menggunakan kemoceng. Penghasilan yang ia dapatkan ia berikan kepada orang tuanya yang memiliki warung kecil dirumahnya. Nabil merupakan anak keempat dari lima bersaudara dan bercita-cita sebagai petugas pemadam kebakaran.

5. Widya Saputri Anti

Widya Saputri Anti yang biasa dipanggil Widya merupakan salah satu anak jalanan yang berada di lampu merah pengayoman. Widya menjalani hari-harinya sebagai pengemis dengan mengharapkan belas kasih dari pengguna jalan. Selama berada di jalanan Widya ditemani oleh sang ibu yang mengawasinya di pinggir toko. Dengan penghasilan sekitar Rp50.000-Rp90.000, ia gunakan untuk membantu membayar utang kedua orang tuanya dan ditabung untuk keperluan sekolahnya.

6. Iqram

Iqram adalah salah satu anak jalanan yang berprofesi sebagai pengemis di perempatan lampu merah abdesir. Dengan penghasilan sehari-hari sekitar Rp30.000 – Rp50.000, Iqram yang masih berusia 14 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu SMP daerah Batua Raya merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Sebagai seorang kakak yang menyayangi adik-adiknya, Iqram membantu ibunya yang tidak bekerja juga sang ayah yang masuk penjara dengan mengais rejeki dari pengguna jalan.

7. Adil Muhammad

Adil Muhammad merupakan seorang anak jalanan yang berusia 14 tahun. Saat ini ia mengenyam pendidikan di SD Batulaccu dan berada kelas 6, dikarenakan kondisi ekonomi yang minim dirinya harus terlambat menerima pendidikan sekolah yang mana seharusnya dirinya berada di Sekolah Menengah Pertama. Kedua orang tua Adil berprofesi sebagai pemulung akan tetapi dikarenakan kondisi sang ibu yang sedang hamil anak kelima, hanya sang ayah yang bekerja. Adil yang berprofesi sebagai pengemis memberikan penghasilannya kepada sang nenek.

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia memang telah menghasilkan kemajuan, namun selain itu tidak dapat dipungkiri selama pembangunan yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa hal buruk, salah satunya adalah terciptanya kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat Indonesia. Dimana di satu sisi ada sebagian masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang tinggi akan tetapi ada juga sebagian masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikan dan pendapatannya masih rendah, bahkan banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kesenjangan sosial ekonomi tersebut memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi baik di perdesaan maupun di perkotaan yang tingkat permasalahannya relatif lebih kompleks. Dari sekian banyak permasalahan yang muncul di perkotaan salah satunya yaitu, munculnya fenomena anak jalanan yang semakin meningkat jumlahnya. Salah satu penyebab timbulnya hal tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Apabila keadaan tersebut tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius, maka akan mengakibatkan terhambatnya

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik jasmani, rohani maupun sosial.

Di tengah masa pandemi saat ini jumlah anak jalanan kian menjamur di mana-mana. Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan di Indonesia, dimana sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi di masa pandemi ini sistem pembelajaran dilakukan secara *online* dikarenakan banyaknya sekolah yang ditutup untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan pendidikan bagi anak jalanan yang seharusnya bersekolah akan tetapi mereka dieksploitasi oleh oknum orang tua untuk mengemis atau mencari sumbangan. Selain hal tersebut persoalan utama sulitnya memberantas anak jalanan adalah masih banyaknya pengguna jalan atau masyarakat yang memberi uang kepada mereka. Persoalan lainnya adalah karena belum adanya Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) sebagai saran pembekalan agar mereka tidak kembali lagi ke jalan.

Agar penanganan dan upaya perlindungan pada anak jalanan dapat memberikan hasil yang lebih baik, tak pelak yang dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak jalanan, dan kemudian merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian kerja yang lebih terkoordinasi.

Berbagai upaya untuk menangani keberadaan anak jalanan telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melaksanakan kebijakan terkait pembinaan anak jalanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008.

Dalam temuan penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar membuat program **‘Pembinaan dan patroli anak jalanan dan PMKS lainnya’**.

Pelaksanaan program merupakan penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan dari program tersebut. Tidak ada artinya dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan bantuan modal ekonomi yang diberikan oleh pemerintah jika tidak diikuti dengan perubahan pandangan dan pola pikir anak jalanan. Dalam penelitian ini upaya penanganan anak jalanan di Kota Makassar dilakukan dengan melihat apakah program efektif atau tidak, maka tolak ukur penilaian yang dapat digunakan adalah organisasi, interpretasi, dan penerapan.

a. Organisasi

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana dan terorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama

serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Dinas Sosial Kota Makassar beberapa kali terjadi peralihan Kepala Dinas Sosial pada tahun 2021 ini, yang berawal dari Bapak Mukhtar Tahir yang turun jabatan pada bulan Mei 2021, kemudian beliau digantikan oleh Bapak Asvira Anwar Kuba SP., M.Si selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar namun tidak berlangsung lama. Pada bulan Juli 2021, Walikota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan Pomanto melantik Ir. Hj. Rusmayani Madjid, MSP sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar menggantikan Bapak Asvira Anwar. Untuk saat ini Dinas Sosial Kota Makassar yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ir. Hj. Rusmayani Madjid lebih memfokuskan pada program pemerintah Penyaluran Bantuan Sosial Covid 19 dari APBD Pemerintah Kota Makassar.

Agar implementasi kebijakan terlaksana dengan efektif maka diperlukan sumber daya yang sangat penting. Tanpa adanya sumber daya maka pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan kurang efektif. Dalam mendukung program pembinaan para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Adapun yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar tidak

terlepas dari beberapa instansi dan lembaga sosial yang ikut andil dalam hal pembinaan anak jalanan. Dalam hal penanganan anak jalanan, pihak Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan tim TRC Saribattang, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan Polrestabes Kota Makassar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar yang menjelaskan bahwa:

“Secara garis besar kita acuannya itu di UU perlindungan anak, Perda nomor 2 tahun 2008. Kenapa ada program kegiatan pembinaan patroli anjal karena di perda dijelaskan bahwa harus ada patroli dititik lampu merah nah di dalam itu ada Tim TRC, Tim Reaksi Cepat Saribattang, anggotanya itu dari Dinas Sosial, Satpol PP Kota Makassar dan Kepolisian Polrestabes. Nah kenapa tiga unsur ini karena untuk penarikan perda itu ada di satpol, terus kepolisian ini untuk mem-*backup* kegiatan patroli dinsos dalam proses penanganan lebih lanjut ketika sudah dijangkau/ditertibkan.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Tim Kerja yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Pemerintah Kota Makassar ini beranggotakan kurang lebih 30 orang. Tim ini nanti akan melakukan tugas lapangan langsung seperti penjarangan, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan di setiap pusat-pusat keramaian Kota Makassar.

Berkaitan dengan sarana prasarana dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan di Kota Makassar terbilang cukup untuk saat ini. Sarana dan prasarana merupakan keseluruhan sumber dan fasilitas yang menunjang dalam proses pembinaan anak jalanan. Berdasarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan,

pengemis dan pengamen, mereka membentuk ketentuan dengan mencari fasilitas, masing-masing dalam bentuk sarana dan prasarana, sehingga anak jalanan mendapat pendampingan dalam kuantitas maupun kualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar yang menjelaskan bahwa:

“Setiap program kegiatan itu kan tiga hal yang penting disitu yang pertama masalah anggaran, kedua sarana prasarana, ketiga itu masalah sumber daya manusia. Untuk saat ini cukup lah, cukup untuk dalam proses penanganan anak jalanan nanti diharapkan kedepan lebih baik lagi.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini berhubungan dengan temuan penelitian tentang pernyataan anak jalanan yang pernah terjaring razia oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar, yang menyatakan bahwa:

“..dikasih tidur ki’, ada tempat khusus tidurnya, yang di jalan sunu itu ada kamarnya. Kayak ranjang susun, baru bisa jki’ juga keluar main-main. Ada tempat main-mainnya. Ada disamping dekat jalan masuknya tapi kalau dirumah na’ ki’ Dinas Sosial, hari-hari ta’ saking’ ikan kaleng terus di makan.” (Wawancara, 18 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar saat ini lebih memfokuskan pada program pemerintah Kota Makassar terkait Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19, namun Dinas Sosial tetap menjalankan program terkait penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Adapun dari segi jumlah sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar

sudah cukup memadai akan tetapi tetap harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilan guna menunjang mereka dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Adapun mengenai sarana dan prasarana yang ada saat ini masih bisa dibilang cukup dalam menangani anak jalanan. Kondisi sarana prasarana yang digunakan Dinas Sosial Kota Makassar seperti mobil patroli, tempat tidur, tempat bermain masih dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan dalam kegiatan patroli TRC Saribattang. Disisi lain belum adanya tempat rehabilitasi atau rumah binaan khusus anak jalanan, namun untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan selama pembinaan dilakukan telah terpenuhi dengan baik.

b. Interpretasi

Interpretasi adalah seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak langsung, namun komunikasi tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami. Interpretasi secara umum, dapat diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi.

Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan program penanganan anak jalanan sudah berjalan efektif di mana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing,

terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas, merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik. Menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangan dengan atasan mereka.

Kemandirian aparatur dalam bekerja juga dilihat dari adanya dorongan dalam diri aparatur itu sendiri untuk melaksanakan tugas yang diemban, lebih menekankan kepada inisiatif yang bersifat positif tanpa perlu terpaku dengan arahan atasan saja, serta komitmen yang dipegang oleh aparatur sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

“Semua program ataupun pembinaan yang telah dijalankan itu semua sudah direncanakan oleh pimpinan di atas. Kami ini tinggal melakukan tugas saja. Kita juga terbatas kalau mau mengacu pada aturan, karena sesuai dengan UU atau peraturan tentang standar peraturan minimal tentang pelayanan sosial, kita melakukan hanya pada pelayanan diluar, sementara didalam seperti di panti sosial itu kewenangan dari provinsi atau kementerian sosial. Jadi semua prosedur itu sudah tertata dengan baik dan kami hanya tinggal menjalankannya saja.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan ialah koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial sudah cukup baik, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu informan yang menjelaskan bahwa:

“Hingga saat ini kami dengan Dinas Sosial juga selalu memiliki komunikasi dan kerjasama yang baik dalam hal

penanganan anak jalanan dan gepeng. Kalau ada anjal atau gepeng yang didapat itu langsung dibawa untuk dilakukan pendataan sama *assesment*” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Dinas Sosial

telah menjalankan program penanganan sesuai dengan koordinasi atasan dengan melakukan patroli rutin tiap bulannya yang bekerjasama dengan Satpol PP dan Polrestabes juga melalui laporan dari kecamatan atau kelurahan juga masyarakat yang menghubungi lewat 112 ataupun melalui media sosial Dinas Sosial Kota Makassar.

c. Aplikasi (Penerapan)

Aplikasi atau penerapan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Sebuah kebijakan akan sukses atau berhasil jika dapat diaplikasikan atau diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (*target group*). Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Terkait standar dan sasaran kebijakan yang dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait diantaranya Dinas Sosial Kota Makassar dan lembaga sosial ataupun tenaga kerja untuk secara bersama-sama menyiapkan sarana pendukung pelatihan bagi anak jalanan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar yang menjelaskan bahwa:

“Tentunya peran masyarakat, SKPD, instansi, LSM, lembaga sosial, harus kita sama-sama. Artinya disini kita bukan Dinas Sosial cuman duduk-duduk tapi kita perlu ada sinergi, kita perlu ada kerja sama yang lain karena tidak mungkin persoalan sosial itu diselesaikan oleh Dinas Sosial karena kita juga perlu akses-akses ke berbagai *stakeholder* supaya masalah itu bisa selesai karena kalau misalnya kita mau melakukan penanganan masalah anak nah ternyata dia tidak sekolah, kita perlu koordinasi ke Dinas Pendidikan, kita perlu koordinasi dengan capil, kita perlu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, ke rumah sakit, kepolisian kalau memang ada tindak kekerasan atau tindak eksploitasi dan koordinasi juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”
(Wawancara, 20 Mei 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Makassar akan menelusuri anak-anak yang putus sekolah di penjuru Kota Makassar. Langkah itu diambil sebagai tindak lanjut banyaknya anak jalanan yang diamankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis kembali melakukan wawancara dengan salah satu anak jalanan yang pernah terjaring razia patroli oleh tim TRC Saribattang, yang mengatakan:

”Saya pernah di jalan tol kak. Biasa di toddopuli, di pengayoman. Biasa dikasih bermalam. Waktu ditangkap pertamaku. Saya tiga hari ja’. Baru waktuku keluar na’ kasihkan ki’ baju, na’ bilang Dinsos ka’ sebelum mauko’ keluar mandi ko’ dulu.”

Dari pernyataan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan teori Charles Jones terkait indikator penerapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar cukup berjalan dengan baik dengan melakukan patroli rutin. Adapun dalam melakukan penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan beberapa dinas terkait dan lembaga sosial seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dll.

Anak jalanan yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk diberikan surat pernyataan dan *assesment*, serta orang tua sang anak akan dipanggil. Apabila orang tua dari anak jalanan tersebut tidak datang untuk menjemput anaknya maka Dinas Sosial Kota Makassar akan melakukan pembinaan kepada anak tersebut sampai orang tua mereka datang menjemput.

2. Metode Pembinaan Penanganan Anak Jalanan

Masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang tidak dapat disingkirkan khususnya di Kota Makassar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi, keterbatasan kesempatan kerja yang ditawarkan, keterbatasan wawasan dan keahlian, masalah migrasi dan ketidakmampuan yang membawa dampak beberapa dari mereka untuk menjalani hidup

dengan terpaksa atau atas kemauan sendiri menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Keberadaan anak jalanan lebih condong membahayakan diri sendiri maupun orang lain, kenyamanan tempat-tempat umum serta memungkinkan menjadi sasaran eksploitasi, sehingga perlu diadakan pengendalian secara sistematis dan kesinambungan. Peran serta dari berbagai pihak untuk melakukan upaya pembinaan terhadap anak jalanan sangat dibutuhkan agar anak-anak jalanan tidak lagi berkeliaran di jalan dan mendapatkan haknya dengan selayaknya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis mencakup tiga bentuk pembinaan. Ketiga bentuk pembinaan tersebut yaitu, Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitas Sosial.

a. Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan tujuan untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 6. Pembinaan pencegahan ini meliputi:

1) Pendataan

Sebelum dilakukan pendataan, pihak Dinas Sosial Kota Makassar beserta TRC Saribattang, Satpol PP Kota Makassar dan Sat Binmas Polrestabes Makassar terlebih dahulu melakukan penjarangan di titik-titik rawan kumpulnya anak jalanan.

“Kalau SOPnya dilapangan itu, memang kategori patroli tapi sifatnya persuasif, karena ini yang kita hadapi adalah bagian dari masyarakat yang bermasalah sosial bukan yang bermasalah hukum. Jadi kita istilahnya menjemput bola. Karena tidak mungkin anak jalanan, terus gepeng itu datang ke kantor, makanya kita turun, kita jangkau, kita bawa ke kantor dan kita lakukan *assesment* itu untuk tau apa masalah-masalah sosial yang dihadapi.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Pendataan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai anak jalanan. Pendataan tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar dengan mempersiapkan pendataan yang berisi nama, tempat tinggal, asal-usul, anggota keluarga, kondisi kehidupan, dan masalah utama yang dihadapi.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal ini kemudian dipertegas oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Proses *assesment* itu, nama anak yang ditertibkan terus tempat dan tanggal lahir, dalam satu keluarga ada siapa aja, bapaknya siapa, mamanya siapa, terus nanti orang tuanya dipanggil bawa KTP dan KK (Kartu Keluarga), karena disitu identitasnya sudah

jelas, dari situ kita sudah tau dia tinggal dimana, dari situ kita koordinasi dengan bidang-bidang lainnya..” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu informan anak jalanan yang melakukan aktifitasnya disekitaran lampu merah abdullah daeng sirua yang menyatakan:

“Banyak ditanyakan ki’. Kayak siapa namanya orang tua ta’? Namanya bapak ta’? Dimana ki’ tinggal? Siapa suruh ki’ begitu? Ditanya baik-baik jki’, jadi ku bilang saya ji mau. Jadi na’ bilang kalau turun ko’ lagi dijalan, ku tangkap ko lagi, nda keluar mko. Itu ji di tanyakan, jadi sudah itu pergi rumah ta dinas sosial ka, na antar ki pergi dirumah ta’ kalau nda ada orang tua ta’ datang.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Dari hasil *assesment* tersebut akan diketahui asal usul alasan anak jalanan ini turun ke jalanan. Apabila ia berasal dari luar daerah maka akan dikoordinasi dan langsung dipulangkan. Setelah diberikan teguran dan nasihat, pihak pekerja sosial menghubungi orang tua dari anak tersebut untuk menjemputnya pulang. Jika orang tua dari anak tersebut tidak datang maka akan dibawa ke pusat rehabilitas sosial atau panti.

2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Dalam kegiatan ini Dinas Sosial Kota Makassar melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan melalui kegiatan patroli dengan cara terjun langsung ke lapangan pada titik-titik rawan

berkumpulnya anak jalanan. Dalam melakukan pemantauan area titik rawan anak jalanan, gepeng dan pengemis, TRC Saribattang Dinsos Makassar memantau area titik rawan seperti di Jl. Ratulangi, Jl. Lanto Dg. Passewang, dan Jl. Kasuari dsb.

Sesuai dengan program *pembinaan dan patroli anak jalanan dan PMKS lainnya*, Dinas Sosial Kota Makassar beserta tim kerja lainnya melaksanakan patroli rutin untuk menjangkau keberadaan anak jalanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Terjadwal dan sifatnya rutin. Ada dibuatkan jadwal, tapi selain ada jadwal dan rutin, biasanya kita juga terima laporan pengaduan dari masyarakat, sisanya ada laporan dari mana kita tindak lanjuti walaupun diluar jadwal yang kita buat.” (Wawancara, Kamil Kamaruddin, 20 Mei 2021)

Dari hasil pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, melalui kegiatan patroli yang dilakukan oleh TRC Saribattang mengamankan beberapa anak jalanan yang terjaring. Setelah diamankan, anak jalanan yang terjaring akan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar untuk selanjutnya di *assesment* dan ditindaklanjuti. Hal ini sesuai instruksi Walikota Makassar Bapak Danny Pomanto, agar penanganan

terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis terus ditingkatkan.

3) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar diharapkan dapat meminimalisir berkembangnya anak yang turun ke jalan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi tentang larangan untuk tidak membiasakan memberikan uang kepada anak jalanan. Peran serta masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk mengurangi tingkat berkembangnya anak turun ke jalan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar yang menjelaskan bahwa:

“..Penting sekali, karena salah satu contoh yang bisa dilakukan masyarakat secara umum adalah jangan memberi uang di jalan. Nah ketika masyarakat memiliki kesadaran dan mengikuti himbuan ini, tentu itu akan menurunkan aktivitas anak jalanan di jalan karena tidak ada lagi yang memberi uang artinya disini perlu diluruskan pemahaman masyarakat bahwa tidak dilarang untuk memberikan infaq/sedekah, tapi jangan di jalan. Artinya masyarakat disini bisa memberikan infaq sedekah lewat lembaga-lembaga sosial atau misalnya di panti asuhan atau bisa juga ke Dinas Sosial berkoordinasi, diskusi, bagaimana caranya atau bisa langsung ke rumah yang bersangkutan.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Meskipun sudah ada larangan untuk tidak memberikan uang tunai kepada anak jalanan, namun

masih saja ada masyarakat yang tidak tahu apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam hal menangani anak jalanan begitupun dengan larangan yang mesti diketahui oleh masyarakat luas. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar belum merata ke semua lapisan masyarakat Kota Makassar karena masih ada saja masyarakat yang masih memberikan uang kepada anak jalanan dengan rasa iba.

b. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara terencana dan teratur dengan tujuan menekan, memberantas, mengurangi dan mencegah penyebaran anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk menertibkan tempat umum. Pembinaan lanjutan ini merupakan lanjutan dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya.

1) Perlindungan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kemudian hari mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,

maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam hal ini Dinas Sosial melakukan perlindungan kepada anak jalanan dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3 tentang Perlindungan Anak yang memuat:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Adapun perlindungan yang dimaksud dalam Perda No.2 Tahun 2008, dilakukan untuk mencegah anak jalanan turun ke jalan dengan membuat posko yang berada dipinggir jalan dan tempat-tempat umum di titik-titik rawan dimanapun anak jalanan sering melakukan aktivitasnya.

“Kita kan turun, keliling Kota Makassar, dilampu merah, itu kita sudah ada, kita dapat kita bawa ke kantor, kita *assessment*, kalau mereka tidak sekolah kita koordinasi ke lembaga yang bersangkutan..”
(Wawancara, 20 Mei 2021)

Berdasarkan hasil pernyataan diatas Dinas Sosial Kota Makassar melakukan perlindungan kepada anak jalanan dengan harapan akan terpenuhinya hak-hak anak dan tumbuh

kembangnya. Namun sampai saat ini belum adanya posko penanganan anak jalanan yang diadakan di titik-titik rawan anak jalanan.

2) Penampungan Sementara

Penampungan sementara dilakukan dengan sistem kelembagaan sosial pemerintah dalam jangka maksimal 10 hari, bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang lembaga sosial tersebut.

“..Karena biasanya dia (anak jalanan) disuruh sama oknum atau keluarga untuk turun di jalan, makanya itu Dinas Sosial melakukan perlindungan sosial dan memanfaatkan sementara waktu pembinaan dalam panti dititipkan sementara sampai ada komunikasi dengan keluarga kemudian ada perubahan-perubahan dalam keluarganya hingga anak dan keluarganya bisa kembali bersama tapi situasi sudah berubah.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Anak jalanan yang terjaring razia oleh tim kerja TRC Saribattang kemudian akan dibawa ke Rumah Perlindungan Anak Sosial dan kemudian akan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar untuk di *assesment*. Berdasarkan hasil temuan penelitian anak jalanan yang menyatakan:

“di kasih naik ki’ di mobil, kalau tidak mauki naik ditarik ki’, dipaksa ki’, baru dibawa mki’ di kantornya, ditanyami, ditanya-tanya ki’. Disitu di perlindungan anak, sudah itu dibawa mki’ ke kantornya Dinas Sosial. baru sudah ditanya, dipanggil ki’ orang tua ta’, bilang dimana rumah ta’, jadi sudah mi’ itu datang mi’ orang tuaku. Diminta ki mi’ KK (Kartu Keluarga) na’, jadi dia bilang kalau satu kali lagi kuliat anak ta’ begini, ku tangkap mi, nda keluar mi’. Tapi ditangkap ka’ lagi

kedua kalinya, keluar ja'." (Wawancara, 18 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil temuan, penampungan sementara ini bertujuan untuk membuat jera anak jalanan yang terjaring dalam razia patroli serta orang tua anak jalanan untuk tidak turun ke jalan lagi.

3) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*assesment*)

Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) dilakukan untuk mengungkap dan memahami masalah dari anak jalanan tersebut dan pemenuhan kebutuhan. Dari adanya pemahaman masalah dan kebutuhan berikutnya dilaksanakan pembinaan sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal ini kemudian dipertegas oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Ketika sudah ditertibkan dibawa ke kantor kemudian dari teman-teman peksos (pekerja sosial) melakukan *assesment* atau pengungkapan masalah apa yang melatarbelakangi dia (anak jalanan) hingga dia dijalan atau persoalan-persoalan yang dia hadapi. Setelah melalui semua proses itu kita rujukan apakah tindak lanjutnya itu dalam proses pembinaan atau rehab atau seperti bantuan pelayanan sosial atau pendampingan sosial juga bisa.” (Wawancara, Kamil Kamaruddin SE., 20 Mei 2021)

Setelah dilakukan *assesment* dan mengetahui persoalan yang di hadapi oleh anak jalanan tersebut.

“..misalnya kita dapatkan anak ini tidak sekolah, kita minta datanya, kita kumpul datanya. Kita coba koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana mengupayakan anak ini bisa kembali ke sekolah, terus misal tidak ada kartu KISnya, tidak ada akte kelahiran, terus orang tua tidak punya KTP. Jadi itu sebenarnya patroli ini tujuannya itu. Kita lakukan tindakan persuasif, kita jemput bola, kita bawa ke kantor, kita *assesment* apa saja persoalannya, kemudian bagaimana kita melakukan penanganan supaya persoalan-persoalan itu satu persatu bisa tertangani.” (Wawancara, 20 Mei 2021)

Berdasarkan pernyataan dan informasi yang disampaikan informan, maka penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) melihat dari penyebab anak turun ke jalan adalah dikarenakan minimnya perekonomian keluarga maka pengungkapan masalah ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu kebutuhan sosial anak jalanan. Adapun anak jalanan yang bersekolah di dukung sedemikian rupa agar anak mengutamakan sekolahnya sehingga tidak terlalu berkonsentrasi pada kegiatan di jalanan.

c. Rehabilitas Sosial

Untuk memperkuat taraf kesejahteraan penerima layanan agar siap menjalankan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sosial, maka rehabilitasi sosial harus diadakan. Rehabilitas sosial yang ditujukan kepada anak jalanan tersebut tentu berbeda-beda sesuai dengan jenis anak jalanan, sebagaimana yang diketahui bahwa anak jalanan terdiri atas tiga jenis yaitu,

anak jalanan usia balita, anak jalanan usia sekolah dan anak jalanan usia produktif. Anak jalanan yang telah tertangkap sebelumnya kemudian ada yang dipulangkan secara bersyarat dan ada juga yang di rujuk ke panti rehabilitas untuk mengikuti pembinaan rehabilitasi.

Dalam rehabilitasi sosial (panti/rumah singgah), anak-anak jalanan yang terjaring diberikan bimbingan mental, bimbingan fisik dan bimbingan sosial. Bimbingan mental spiritual dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku individu maupun kelompok terhadap anak jalanan usia produktif bertimbang dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang mencakup bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar yang menjelaskan bahwa:

“Jadi misalkan ini anak perlu perlindungan sosial itu kita bisa rujuk disitu untuk sementara waktu dibina dalam arti mentalnya, perilakunya, rasa amannya terhadap oknum dan keluarganya.” (*Wawancara, Kamil Kamaruddin SE., 20 Mei 2021*)

Adapun bimbingan mental terhadap anak jalanan usia sekolah dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan seperti ibadah sholat berjamaah ataupun mengaji, bimbingan budi pekerti yang dilakukan oleh pendamping.

“..Tapi dengan berjalannya waktu Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi kerja sama dengan SKPD lainnya, misalnya ada kita dapatkan anak ini tidak sekolah, kita minta datanya, kita kumpulkan datanya, kita coba koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana mengupayakan anak ini bisa kembali ke sekolah.” (Wawancara, Kamil Kamaruddin SE., 20 Mei 2021)

Adapun bimbingan fisik dan sosial yang diberikan adalah anak jalanan mendapat perlindungan fisik melalui kegiatan olahraga dan perlindungan psikis melalui pembinaan mental. Bimbingan sosial juga sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok. Bimbingan sosial merupakan kegiatan yang membantu anak untuk mengatasi masalah sehari-hari, baik dalam lingkungan jalanan, pekerjaan, keluarga maupun masalah pribadi. Bimbingan sosial yang dilakukan bertujuan untuk membangun komunikasi dengan orang lain melalui sosialisasi dan bimbingan minat dengan cara memfasilitasi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Penanganan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan teori Charles O. Jones, berjalan kurang efektif. Hal ini dikarenakan terkait:

- a. Organisasi ialah pembentukan atau penataan kembali sumber daya dan sarana prasarana untuk mendukung program berjalan, dalam hal sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki terbilang kurang memadai untuk saat ini terkait penanganan anak jalanan. Dalam hal ini kebutuhan pelatihan anak jalanan seperti buku, papan tulis, dan alat mengajar lainnya yang belum memadai. Dari segi sumber daya dikhususkan memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini ini dapat dilihat dari aparatur yang melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dengan menunjukkan kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan pembinaan. Aparatur Dinas Sosial dituntut untuk melakukan pendekatan kepada anak jalanan yang terjaring razia agar dapat menceritakan

alasannya mengapa berkeliaran dijalanan dan dapat membujuk anak jalanan untuk mau menjalani pembinaan.

- b. Interpretasi, menginterpretasikan program agar menjadi rencana yang sesuai dan dilaksanakan, Dinas Sosial telah melaksanakan program sesuai dengan koordinasi pimpinan.
- c. Penerapan, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin, standar dan sasaran kebijakan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar melibatkan dinas terkait dan lembaga sosial untuk bersama-sama menyiapkan sarana pendukung bagi anak jalanan.

Hal ini didukung dengan pengukuran efektivitas program oleh Budiani yang meliputi, 1) ketetapan sasaran program, dalam hal ini sasaran utama dibentuknya program ini adalah anak jalanan. 2) sosialisasi program, yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar baik secara langsung maupun tidak langsung, sosialisasi yang dilakukan belum merata ke seluruh masyarakat Kota Makassar. 3) pencapaian tujuan program, tujuan dari program pembinaan anak jalanan ialah untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Makassar namun sampai ini masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di jalanan. 4) pemantauan program, dalam hal ini pemantauan setelah program dilakukan sebagai langkah untuk memastikan tujuan program dilaksanakan dengan optimal. Hasil yang didapat setelah terjaring razia, setelah anak jalanan yang dibina selama 3 hari diberikan bantuan seperti paket keperluan sekolah.

2. Melihat Dinas Sosial Kota Makassar melakukan pembinaan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 yang meliputi pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial pada keseluruhan disimpulkan bahwa kurang baik, karena dari ketiga bentuk pembinaan ini masih ada bentuk pembinaan yang tidak berjalan maksimal. Adapun penjelasan indikator, sebagai berikut.
- a. Upaya yang telah dilakukan dalam hal pembinaan pencegahan berjalan cukup baik, yang meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta sosialisasi. Kekurangan dari pembinaan pencegahan ialah sosialisasi yang belum merata ke semua lapisan masyarakat, hal ini sesuai dengan masih banyaknya masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan di jalan.
 - b. Adapun pembinaan lanjutan yang dilakukan belum berjalan dengan baik, dalam hal ini meliputi perlindungan, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*), dan penampungan sementara. Kendala yang dihadapi ialah belum adanya rumah singgah atau rumah binaan yang bisa menampung anak jalanan untuk dilakukan pembinaan.
 - c. Terkait dengan rehabilitas sosial sama halnya dengan pembinaan pencegahan untuk saat ini berjalan cukup baik. Rehabilitas sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta diproses secara hukum. Dikhususkan untuk anak

jalanan yang terindikasi kenakalan remaja seperti narkoba, isap lem ataupun pelecehan, Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Narkoba, anak jalanan yang diketahui menggunakan narkoba atau mengisap lem akan dilakukan *assesment* dan dirujuk ke YKP2N untuk dilakukan rehabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Keterbatasan sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kota Makassar masih kurang dan terbatas. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kota Makassar masih perlu perbaikan dan pengadaan barang baru, sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun mengenai kualitas aparatur Dinas Sosial Kota Makassar yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan aparatur dapat diatasi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan kompetensi lainnya terkait pembinaan anak jalanan.
2. Tingkat eksploitasi terhadap anak jalanan di Kota Makassar masih terbilang cukup tinggi. Maka dari itu diharapkan dari pihak Pemerintah Kota Makassar maupun Dinas Sosial Kota Makassar untuk lebih memperhatikan mengenai eksploitasi anak, dimana masih banyaknya

orang tua yang menggunakan anaknya untuk meminta belas kasih pengguna jalan. Adapun eksploitasi yang mengatasnamakan lembaga atau panti sosial lainnya. Diharapkan pihak Dinas Sosial Kota Makassar memberikan teguran tegas atau diberikan pembinaan kepada orang tua yang melakukan eksploitasi kepada anaknya.

3. Sebaiknya Pemerintah Kota Makassar lebih tegas dalam hal penanganan anak jalanan di Kota Makassar di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Masih banyaknya anak-anak jalanan yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Kesehatan anak jalanan pun harus turut diperhatikan dan diberikan pemahaman mengenai kondisi saat ini.
4. Perlunya peningkatan kualitas aparatur, penambahan jumlah aparatur, anggaran serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja aparatur dalam proses penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Adanya evaluasi terhadap kinerja aparatur terkait penanganan anak jalanan di Kota Makassar dan melakukan perbaikan hal yang masih dianggap kurang sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.
5. Perlu adanya kerjasama antara Dinas Sosial Kota Makassar dengan lembaga sosial atau komunitas yang berfokus kepada anak jalanan. Salah satunya ialah Komunitas Peduli Anak Jalanan yang dapat membantu membina anak jalanan tersebut. Perlunya ketersediaan rumah singgah atau rumah binaan untuk anak-anak yang terjaring dan perlu dibina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- , 2005. *Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemda Otonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan*. Penerbit PKP2A III LAN.
- Ambarwati, Arie. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Surabaya: Media Nusa Creative.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Haris, Andi Tenri Citra. 2020. *Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan*. Yogyakarta: Leutika Prio. (Books Google, Diakses pada tanggal 23 Januari 2021).
- Nawawi, Ismal. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Iin Tri dan Tristiadi Ardi Ardani. 2004. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Satori, Djam'an dan Riduwan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sore B. Uddin dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Syaodih, Nana. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal:

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 (1): 1-11. (Diakses pada tanggal 14 Februari 2021)

Anandar, Rivanlee dan Hery Wibowo. *Model Pendekatan Centre Based Dalam Menangani Anak Jalanan Perempuan*. Share: Social Work Jurnal. Vol 5 (2): 142-156. (Diakses pada tanggal 03 Februari 2021)

Anasiru, Ronawaty. 2011. *Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Jurnal Sosiokonsepsia. Vol 16 (2): 175-186. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020)

Anugrawati, Luky Kharlina. 2014. *Konstruksi Modal Manusia dan Performa Kualitas Hidup Anak Jalanan (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca Malang)*. JIEP. Vol 14 (2): 58-91.

Astri, Herlina. 2014. *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. Vol 5 (2): 145-155. (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020)

Aruan, Rita Vinolia dan Roy Frendrick Halawa. 2019. *Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Medan*. Jurnal Darma Agung. Vol 23 (3): 1175.

- Bahfiarti, Tuti, Rahmat Muhammad, dan Aminuddin. 2019. *Kajian Penanganan Anak Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar (Study on Handling of Children and Beggars In Makassar City)*. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar. Vol 1 (2): 43-54. (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020)
- Darmawan, W. “*Peta Masalah Anak Jalanan dan Alternatif Model Pemecahannya Berbasis Pemberdayaan Keluarga*”, dalam HTML Document. (diakses pada tanggal 13 Maret 2021)
- Lubis, P. Rizal. 2020. Pengaruh Disiplin Kinerja dan Pengawasan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Alindobaja Perkasa Medan. Jurnal Ilmiah :JUMANSI STINDO” Medan. Vol 2 (3). (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021)
- Manan, Syaepul. 2017. Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim. Vol 15 (1): 52 (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021)
- Manongga, Alman, Sofia Pangemanan, dan Josef Kairupan. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol 1 (1): 1-10. (Diakses pada tanggal 14 Februari 2021)
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat. Vol 12, Edisi 3: 145-151. (Diakses pada tanggal 28 Januari 2021)
- Ponto, Aldrin M., Novie R. Pioh, dan Femmy Tasik. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. Vol 3. (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021)
- Ramadhani, M., Sarbaini, dan Harpani Matnuh. 2016. *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 6 (11): 947-954. (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020)
- Sari, Riza Fitria Sartika. 2015. *Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 3 (1): 4. (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021)

Sari, Dian Permata & Titik Sumarti. 2017. *Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Vol 1 (1): 29-42. (Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020)

Putra, Fikriyandi, Desi Hasanah St. A, dan Eva Nuriyah H. *Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah*. Jurnal Share Social Work. Vol 5 (1): 51-64. (Diakses pada tanggal 03 Februari 2021)

Skripsi:

Nurhanifah. 2015. *Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 41 Cimahi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Bandung.

Undang-Undang & Peraturan Daerah:

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Web:

Ditjen Rehsos. 2020. Jakarta. <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres> (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020).

Vivi Riski Indriani. 2020. <https://makassar.sindonews.com/read/117728/711/dinsos-masih-sulit-tangani-anjal-gepeng-yang-terus-bertambah-1596064033> (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020).

Fahrizal Syam. 2021. <https://makassar.tribunnews.com/2021/04/11/anjal-dan-gepeng-kian-menjamur-jelang-ramadan-danny-pomanto-ancam-ganti-pejabat-dinsos-makassar> (Diakses pada tanggal 17 April 2021)

Kamsah. 2021 <https://makassar.terkini.id/siapkan-program-rangkul-anak-jalanan-danny-pomanto-sebut-mereka-punya-bakat/> (Diakses pada tanggal 17 April 2021).

Media Sosial:

Instagram: @humas_dinsos.makassarkota



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

I. Judul Penelitian

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN
ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR**

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program penanganan anak jalanan di Kota Makassar?
2. Bagaimana metode pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program penanganan anak jalanan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui metode pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan.

IV. Fokus Penelitian

1. Implementasi program penanganan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
2. Metode pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan.

V. Informan Penelitian

1. Pemerintah

- a. Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan,
Pengemis dan Pemulung = 1 orang

2. Masyarakat

- a. Anak Jalanan = 6 orang



Lampiran 3. Daftar Informan

No.	Nama	Pekerjaan / Bidang
1	Kamil Kamaruddin SE.	Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis
2	Fahmi	Anak Jalanan
3	Abi	Anak Jalanan
4	Nabil Syam	Anak Jalanan
5	Widya Saputri Anti	Anak Jalanan
6	Iqram	Anak Jalanan
7	Adil Muhammad	Anak Jalanan

BOSOWA

Lampiran 4. Tabel Matriks Untuk Pengembangan Instrumen Penelitian

No	Pertanyaan	Indikator	Wawancara	Observasi
1.	Bagaimana implementasi program penanganan anak jalanan di Kota Makassar?	Implementasi Kebijakan (Charles O. Jones, 1996) 1. Organisasi 2. Interpretasi 3. Aplikasi (penerapan)	<p>1. “Secara garis besar kita acuannya itu di UU perlindungan anak, Perda nomor 2 tahun 2008. Kenapa ada program kegiatan pembinaan patroli anjal karena di perda dijelaskan bahwa harus ada patroli dititik lampu merah nah di dalam itu ada Tim TRC, Tim Reaksi Cepat Saribattang, anggotanya itu dari Dinas Sosial, Satpol PP Kota Makassar dan Kepolisian Polrestabes. Nah kenapa tiga unsur ini karena untuk penarikan perda itu ada di satpol, terus kepolisian ini untuk mem-<i>backup</i> kegiatan patroli dinsos dalam proses penanganan lebih lanjut ketika sudah dijangkau/ditertibkan.” (KK, 20 Mei 2021)</p> <p>“Setiap program kegiatan itukan tiga hal yang penting disitu yang pertama masalah anggaran, kedua sarana prasarana, ketiga itu masalah sumber daya manusia. Untuk saat ini cukup lah, cukup untuk dalam proses penanganan anak jalanan nanti diharapkan kedepan lebih baik lagi.” (KK, 20 Mei 2021)</p> <p>“..dikasih tidur ki’, ada tempat khusus tidurnya, yang di jalan sunu itu ada kamarnya. Kayak ranjang susun, baru bisa jki’ juga keluar main-main. Ada tempat</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait indikator. Berkaitan dengan indikator organisasi yang meliputi sarana dan prasarana penanganan anak jalanan terbilang kurang efektif untuk saat ini. Secara kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar sudah cukup mumpuni akan tetapi harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki agar bisa menunjang dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada.</p> <p>Terkait dengan penerapan, dalam hal ini standar dan sasaran kebijakan yang dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan melibatkan dinas terkait untuk mendukung sarana pelatihan bagi anak jalanan.</p>

			<p>main-mainnya. Ada disamping dekat jalan masuknya tapi kalau dirumah na' ki' Dinas Sosial, hari-hari ta' saking' ikan kaleng terus di makan.” (I, 18 Agustus 2021)</p> <p>2. “Semua program ataupun pembinaan yang telah dijalankan itu semua sudah direncanakan oleh pimpinan di atas. Kami ini tinggal melakukan tugas saja. Kita juga terbatas kalau mau mengacu pada aturan, karena sesuai dengan UU atau peraturan tentang standar peraturan minimal tentang pelayanan sosial, kita melakukan hanya pada pelayanan diluar, sementara didalam seperti di panti sosial itu kewenangan dari provinsi atau kementerian sosial. Jadi semua prosedur itu sudah tertata dengan baik dan kami hanya tinggal menjalankannya saja.” (KK, 20 Mei 2021)</p> <p>3. “Tentunya peran masyarakat, SKPD, instansi, LSM, lembaga sosial, harus kita sama-sama. Artinya disini kita bukan Dinas Sosial cuman duduk-duduk tapi kita perlu ada sinergi, kita perlu ada kerja sama yang lain karena tidak mungkin persoalan sosial itu diselesaikan oleh Dinas Sosial karena kita juga perlu akses-akses ke berbagai <i>stakeholder</i> supaya masalah itu bisa selesai karena kalau misalnya kita mau</p>	
--	--	--	---	--

			<p>melakukan penanganan masalah anak nah ternyata dia tidak sekolah, kita perlu koordinasi ke Dinas Pendidikan, kita perlu koordinasi dengan capil, kita perlu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, ke rumah sakit, kepolisian kalau memang ada tindak kekerasan atau tindak eksploitasi dan koordinasi juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.” (KK, 20 Mei 2021)</p>	
2.	<p>Bagaimana metode pembinaan yang diberikan untuk penanganan anak jalanan?</p>	<p>Metode Pembinaan Anak Jalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Pencegahan 2. Pembinaan Lanjutan 3. Rehabilitas Sosial 	<p>1. “Kalau SOPnya dilapangan itu, memang kategori patroli tapi sifatnya persuasif, karena ini yang kita hadapi adalah bagian dari masyarakat yang bermasalah sosial bukan yang bermasalah hukum. Jadi kita istilahnya menjemput bola. Karena tidak mungkin anak jalanan, terus gepeng itu datang ke kantor, makanya kita turun, kita jangkau, kita bawa kekantor dan kita lakukan <i>assesment</i> itu untuk tau apa masalah-masalah sosial yang dihadapi.”</p> <p>“Proses <i>assesment</i> itu, nama anak yang ditertibkan terus tempat dan tanggal lahir, dalam satu keluarga ada siapa aja, bapaknya siapa, mamanya siapa, terus nanti orang tuanya dipanggil bawa KTP dan KK (Kartu Keluarga), karena disitu identitasnya sudah jelas, dari situ kita sudah tau dia tinggal dimana, dari situ kita koordinasi dengan bidang-bidang lainnya..” (KK, 20 Mei 2021)</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait indikator. Adapun metode pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan memang benar adanya mengacu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, yang terdiri atas tiga bentuk pembinaan yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial. Pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal ini ialah melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh tim TRC Saribattang, selanjutnya anak jalanan yang terjaring dilakukan pendataan juga <i>assesment</i> untuk mengetahui persoalan dari anak jalanan tersebut. Adapun</p>

			<p>“Banyak ditanyakan ki’. Kayak siapa namanya orang tua ta’? Namanya bapak ta’? Dimana ki’ tinggal? Siapa suruh ki’ begitu? Ditanya baik-baik jki’, jadi ku bilang saya ji mau. Jadi na’ bilang kalau turun ko’ lagi dijalan, ku tangkap ko lagi, nda keluar mko. Itu ji di tanyakan, jadi sudah itu pergi rumah ta dinas sosial ka, na antar ki pergi dirumah ta’ kalau nda ada orang tua ta’ datang.” (I, 18 Agustus 2021)</p> <p>“Terjadwal dan sifatnya rutin. Ada dibuatkan jadwal, tapi selain ada jadwal dan rutin, biasanya kita juga terima laporan pengaduan dari masyarakat, sisanya ada laporan dari mana kita tindak lanjuti walaupun diluar jadwal yang kita buat.” (KK, 20 Mei 2021)</p> <p>“..Penting sekali, karena salah satu contoh yang bisa dilakukan masyarakat secara umum adalah jangan memberi uang dijalan. Nah ketika masyarakat memiliki kesadaran dan mengikuti himbuan ini, tentu itu akan menurunkan aktivitas anak jalanan di jalan karena tidak ada lagi yang memberi uang artinya disini perlu diluruskan pemahaman masyarakat bahwa tidak dilarang untuk memberikan infaq/sedekah, tapi jangan dijalan. Artinya masyarakat disini bisa memberikan infaq sedekah lewat lembaga-lembaga sosial atau misalnya di panti asuhan atau bisa juga ke Dinas Sosial berkoordinasi, diskusi,</p>	<p>pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran dijalan tetapi Dinas Sosial telah semaksimal mungkin untuk mengurangi dengan melakukan patroli dan sosialisasi. Adapun sosialisasi yang dilakukan belum merata ke semua lapisan masyarakat Kota Makassar karena masih ada saja masyarakat yang masih memberikan uang kepada anak jalanan. Terkait dengan penampungan sementara, saat ini belum adanya tempat rehabilitas atau tempat khusus untuk anak jalanan di Kota Makassar.</p>
--	--	--	---	--

			<p>bagaimana caranya atau bisa langsung ke rumah yang bersangkutan.” (KK, 20 Mei 2021)</p> <p>2. “Kita kan turun, keliling Kota Makassar, dilampu merah, itu kita sudah ada, kita dapat kita bawa ke kantor, kita <i>assessment</i>, kalau mereka tidak sekolah kita koordinasi ke lembaga yang bersangkutan..”</p> <p>“..Karena biasanya dia (anak jalanan) disuruh sama oknum atau keluarga untuk turun di jalan, makanya itu Dinas Sosial melakukan perlindungan sosial dan memanfaatkan sementara waktu pembinaan dalam panti dititipkan sementara sampai ada komunikasi dengan keluarga kemudian ada perubahan-perubahan dalam keluarganya hingga anak dan keluarganya bisa kembali bersama tapi situasi sudah berubah.”</p> <p>“di kasih naik ki’ di mobil, kalau tidak mau ki naik ditarik ki’, dipaksa ki’, baru dibawa mki’ di kantornya, ditanyami, ditanyanya ki’. Disitu di perlindungan anak, sudah itu dibawa mki’ ke kantornya Dinas Sosial. baru sudah ditanya, dipanggil ki’ orang tua ta’, bilang dimana rumah ta’, jadi sudah mi’ itu datang mi’ orang tuaku. Diminta ki mi’ KK (Kartu Keluarga) na’, jadi dia bilang kalau satu kali lagi kuliat anak ta’ begini, ku tangkap mi, nda keluar mi’. Tapi ditangkap ka’ lagi kedua kalinya, keluar ja’.” (I, 18</p>	
--	--	--	---	--


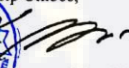
			<p>Agustus 2021)</p> <p>“Ketika sudah ditertibkan dibawa ke kantor kemudian dari teman-teman peksos (pekerja sosial) melakukan <i>assesment</i> atau pengungkapan masalah apa yang melatarbelakangi dia (anak jalanan) hingga dia dijalan atau persoalan-persoalan yang dia hadapi. Setelah melalui semua proses itu kita rujukan apakah tindak lanjutnya itu dalam proses pembinaan atau rehab atau seperti bantuan pelayanan sosial atau pendampingan sosial juga bisa.” (KK, 20 Mei 2021)</p> <p>“..misalnya kita dapatkan anak ini tidak sekolah, kita minta datanya, kita kumpul datanya. Kita coba koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana mengupayakan anak ini bisa kembali kesekolah, terus misal tidak ada kartu KISnya, tidak ada akte kelahiran, terus orang tua tidak punya KTP. Jadi itu sebenarnya patroli ini tujuannya itu. Kita lakukan tindakan persuasif, kita jemput bola, kita bawa ke kantor, kita <i>assesment</i> apa saja persoalannya, kemudian bagaimana kita melakukan penanganan supaya persoalan-persoalan itu satu persatu bisa tertangani.” (KK, 20 Mei 2021)</p> <p>3. “Jadi misalkan ini anak perlu perlindungan sosial itu kita bisa rujuk disitu untuk sementara waktu dibina dalam arti mentalnya, perilakunya, rasa amannya terhadap oknum dan keluarganya.”</p>	
--	--	--	--	--

			<p>“..Tapi dengan berjalannya waktu Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi kerja sama dengan SKPD lainnya, misalnya ada kita dapatkan anak ini tidak sekolah, kita minta datanya, kita kumpulkan datanya, kita coba koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana mengupayakan anak ini bisa kembali ke sekolah.” (KK, 20 Mei 2021)</p>	
--	--	--	---	--

TEMUAN PENELITIAN

Implementasi Kebijakan	Indikator
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi : terkait sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbilang cukup untuk saat ini 2. Interpretasi : Dinas Sosial telah menjalankan program sesuai koordinasi dari pimpinan 3. Aplikasi : Dinas Sosial melibatkan dinas lain terkait penanganan anak jalanan.
Pembinaan Anak Jalanan	Indikator
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Pencegahan : pembinaan yang dilakukan berjalan cukup baik 2. Pembinaan Lanjutan : pembinaan lanjutan belum memiliki sarana dan prasaran dengan baik 3. Rehabilitas Sosial : rehabilitas yang dilakukan berjalan cukup baik.
Kesimpulan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal 2. Pembinaan anak jalanan belum berjalan dengan maksimal 	

Lampiran 5. Surat Permintaan Izin Penelitian dari Universitas

	UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568 Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id
Nomor	: A.120/FSP/UNIBOS/V/2021
Lampiran	: 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal	: <u>Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi</u>
Kepada Yth, Dinas Sosial Kota Makassar	
Di- Kota Makassar	
Dengan hormat, Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :	
Nama	: Yuniarti Miftahul Jannah
NIM	: 45 17 021 025
Judul penelitian	: Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar
Tempat	: Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.
Waktu	: Mei - Juni 2021
Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.	
Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Makassar, 11 Mei 2021 Dekan Fkip Unibos,  Arje Wicaksono, S.Ip, M.A Nid. 09271107602	
Tembusan : 1. Arsip	

Lampiran 6. Surat Permintaan Izin Penelitian ke Dinas Penanaman Modal



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.121/FSP/UNIBOS/V/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Di-
Kota Makassar

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Yuniarti Miftahul Jannah
NIM : 45 17 021 025
Judul penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di
Dinas Sosial Kota Makassar
Tempat : Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.
Waktu : Mei - Juni 2021

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 11 Mei 2021
Dekan Fisip Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Nidn : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal


1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 5 0 6 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14655/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.121/FSP/UNIBOS//2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **YUNIARTI MIFTAHUL JANNAH**
Nomor Pokok : 4517021025
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Juni 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Mei 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 11-05-2021

 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran 8. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 17 Mei 2021

K e p a d a

Nomor : 070 / 800 -II/BKBPV/2021
Sifat :
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : **14655/S.01/PTSP/2021**, Tanggal 11 Mei 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : **YUNIARTI MIFTAHUL JANNAH**
NIM / Jurusan : 4517021025 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **17 Mei s/d 11 Juni 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

WALIKOTA MAKASSAR
PIL. KEPALA BADAN

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM
Pangkat: Pembina
NIP. : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 9. Lokasi Penelitian



(Dinas Sosial Kota Makassar)

Jl. Arif Rahman Hakim No.50, Ujung Pandang Baru,
Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90211

Lampiran 10. Wawancara dengan Informan



(20 Mei 2021)

Kamil Kamaruddin SE.

(Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalan,
Gelandangan, Pengemis dan Pemulung)



(11 Juni 2021)



**(Anak Jalanan)
-Abi, Nabilsyam,
Fadil-**

(2 Juni 2021)

Wawancara dengan





(Anak Jalanan)

-Al & Fahmi-

(16 Juni 2021)

Mereka adalah anak-anak yang mencari uang dengan menjadi tukang parkir di salah pusat perbelanjaan yang berada di daerah Abdesir. penghasilan yang mereka dapatkan digunakan untuk jajan dan kebutuhan sekolah.

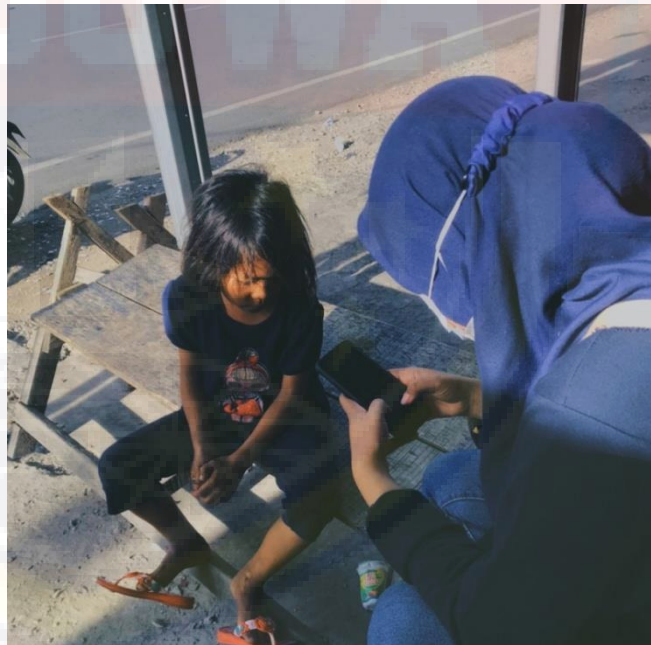




(Anak Jalanan)
-Widya Saputri Anti-
Lampu Merah
Pengayoman

(16 Juni 2021)

Demi membayar utang orang tua juga mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, Widya Saputri Anti atau biasa dipanggil Widya mencari uang dengan mengemis kepada pengguna jalan.





(15 Juli 2021)

(Anak Jalanan)

Bertempat tinggal di Manggala, anak-anak ini merupakan anak-anak binaan dari Komunitas Peduli Anak Jalanan.



“Biasa kalau kuliat adikku menangis, mau jajan, pergi ka carikan uang, biar saya nda sekolah, biar saya terlambat..”

-Iqram-

(18 Agustus 2021)

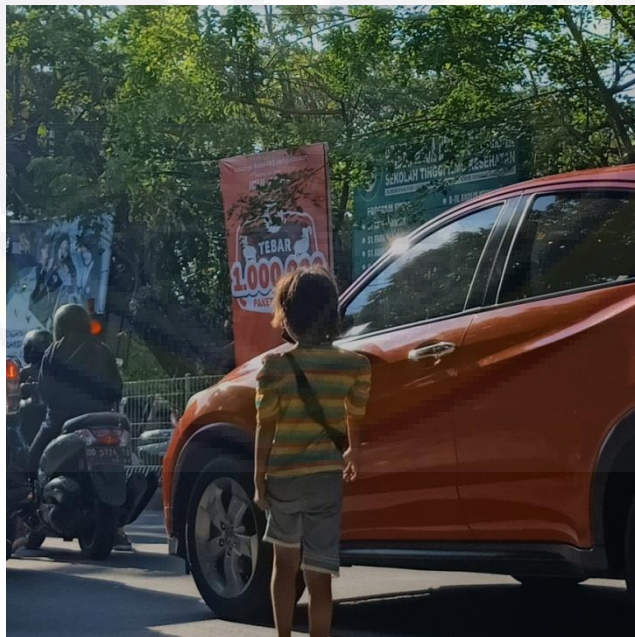


-Iqram, Citra, dan Amira-



-Abil & Sakiyah-
(18 Agustus 2021)

-Amira-





(30 Juni 2021)

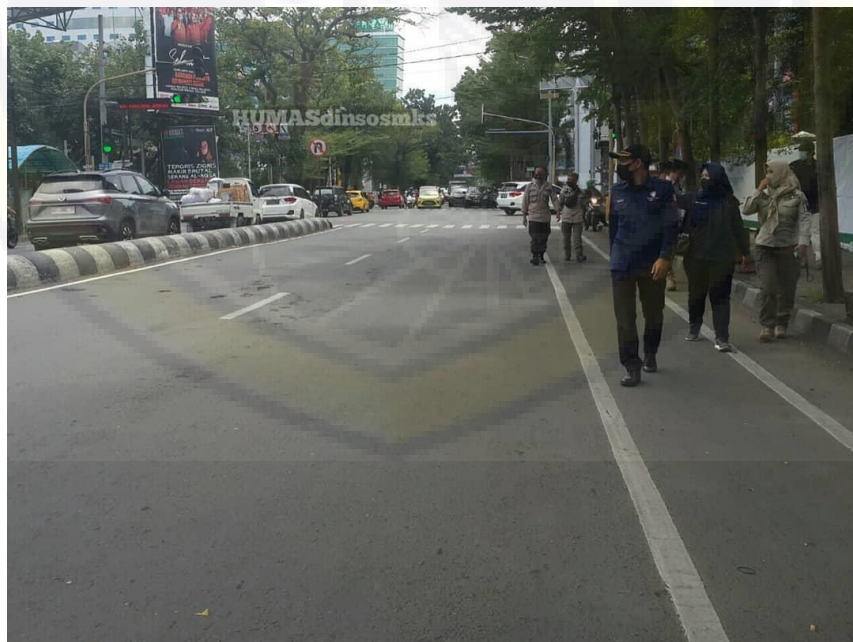
Penjangkauan pengemis dengan modus jualan tissu.
Sakti Peksos melakukan assesment kepada anak jalanan hasil
jangkauan TRC Saribattang. Penjangkauan atas tindaklanjut laporan
masyarakat di wilayah Kec. Panakukkang Kota Makassar





(30 Juni 2021)

Pemantauan area titik rawan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. TRC Saribattang Dinsos Makassar memantau area titik rawan yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi-Jl. Lanto Dg. Passewang-Jl. Kausaru Kota Makassar





(26 Juni 2021)

TRC Saribattang menjangkau peminta-minta
sumbangan yang diduga fiktif mengatasmakan
pencarian amal